

DINAMIKA DAN TRANSFORMASI POLITIK ASIA TIMUR

IDEOLOGI, RESTORASI, DAN KONFLIK REGIONAL
(1535-1954)



Yadi Kusmayadi, M.Pd. | Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.

Dr. Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd. | Dewi Ratih, M.Pd. | Wulan Sondarika, M.Pd.

Aan Suryana, M.Pd. | Sri Pajriah, M.Pd. | Egi Nurholis, M.Pd. | Sudarto, M.Pd.

Ghea Andriany Hervista, M.Pd.

Dkk.



**DINAMIKA DAN TRANSFORMASI POLITIK
ASIA TIMUR IDEOLOGI, RESTORASI, DAN
KONFLIK REGIONAL (1535-1954)**

DINAMIKA DAN TRANSFORMASI POLITIK ASIA TIMUR IDEOLOGI, RESTORASI, DAN KONFLIK REGIONAL (1535-1954)

**Yadi Kusmayadi, M.Pd. | Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.
Dr. Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd. | Dewi Ratih, M.Pd.
Wulan Sondarika, M.Pd. | Aan Suryana, M.Pd.
Sri Pajriah, M.Pd. | Egi Nurholis, M.Pd.
Sudarto, M.Pd. | Ghea Andriany Hervista, M.Pd.
Dkk.**



DINAMIKA DAN TRANSFORMASI POLITIK ASIA TIMUR IDEOLOGI, RESTORASI, DAN KONFLIK REGIONAL (1535-1954)

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

**Yadi Kusmayadi, M.Pd. | Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.
Dr. Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd. | Dewi Ratih, M.Pd. | Wulan Sondarika, M.Pd.
Aan Suryana, M.Pd. | Sri Pajriah, M.Pd. | Egi Nurholis, M.Pd. | Sudarto, M.Pd.
Ghea Andriany Hervista, M.Pd.**

Kontributor: Terlampir

Editor: Yudi Umara

Cetakan Pertama: Januari 2026

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2026, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2026 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I - : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2026
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN 978-634-239-308-6

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Asia Timur merupakan kawasan yang sarat dengan dinamika sejarah panjang, pertemuan ideologi, serta pergulatan kekuasaan yang membentuk wajah politik regional hingga hari ini. Rentang waktu antara abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20 menjadi fase krusial, ketika tradisi lama bertemu dengan gagasan baru, kekuasaan imperial diuji, dan tatanan politik mengalami transformasi mendasar.

Buku *Dinamika dan Transformasi Politik Asia Timur: Ideologi, Restorasi, dan Konflik Regional (1535–1954)* hadir untuk mengajak pembaca memahami proses perubahan tersebut secara utuh dan berimbang. Periode ini mencakup runtuh dan bangkitnya kekuasaan tradisional, masuknya pengaruh Barat, lahirnya nasionalisme modern, hingga konflik regional yang meninggalkan jejak mendalam bagi negaranegara Asia Timur. Sejarah tidak disajikan semata sebagai deretan peristiwa, melainkan sebagai proses sosial dan politik yang saling terhubung dan terus berpengaruh hingga masa kini.

Penulisan buku ini berangkat dari kesadaran bahwa sejarah politik Asia Timur sering kali dipahami secara terpisah-pisah. Oleh karena itu, buku ini mencoba menyatukan berbagai peristiwa besar—mulai dari transformasi ideologi, upaya restorasi kekuasaan, hingga konflik regional—dalam satu alur narasi yang mudah dipahami tanpa menghilangkan kedalaman analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan akademik sekaligus minat pembaca umum.



Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, membuka wawasan, serta menumbuhkan pemahaman kritis terhadap dinamika politik Asia Timur. Semoga kehadiran buku ini tidak hanya memperkaya khazanah historiografi, tetapi juga memberi inspirasi bagi pembaca untuk melihat sejarah sebagai cermin dalam memahami tantangan masa kini dan masa depan.

Januari 2026

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 DINAMIKA POLITIK ASIA TIMUR KONSEP GAGASAN NEGARA MENURUT SUN YAT SEN.....	1
A. Kondisi Sosial-Politik Tiongkok Menjelang Akhir Dinasti Manchu.....	3
B. Sun Yat Sen Sebagai Tokoh Pemikir Politik.....	6
C. Tiga Prinsip Rakyat sebagai Konsep Negara.....	7
D. Fase awal terbentuknya Republik China	9
E. Warisan Pemikiran Sun Yat Sen	11
F. Rangkuman	13
BAB 2 LOMPATAN CINA JAUH KE DEPAN OLEH MAO ZEDONG	17
A. Latar Belakang Historis dan Kondisi Awal Republik Rakyat Tiongkok	17
B. Runtuhnya Pemerintahan Beiyang dan Era Panglima Perang (1912-1928)	19
C. Biografi Mao Zedong	25
D. Kondisi Masyarakat Cina Masa Mao Zedong tahun 1949-1960.....	26
E. Kebijakan ekonomi era awal Mao Zedong (Reformasi Tanah, Nasionalisasi Industri)	27
F. Konsep dan tujuan lompatan jauh ke depan Mao Zedong.....	30



G. Implementasi Program Lompatan Jauh Cina Ke Depan	32
H. Rangkuman	36
BAB 3 JEPANG DI BAWAH KEKUASAAN TRIUMVIRAT 1535-1616 (Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu).....	40
A. Oda Nobunaga (1535-1582)	43
B. Toyotomi Hideyoshi (1537-1598).....	46
C. Tokugawa Ieyasu (1543-1616)	51
D. Rangkuman	55
BAB 4 RESTORASI MEIJI 1868-1912	58
A. Proses dan Peristiwa Restorasi Meiji	60
B. Kebijakan dan Reformasi Utama Kaisar Meiji.....	64
C. Dampak Restorasi Meiji Terhadap Jepang Modern	68
D. Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Cina dan Korea.....	71
E. Rangkuman	73
BAB 5 KONFLIK SEDARATAN DI ASIA TIMUR TENTANG CHINA, KOREA DAN JEPANG DALAM PERDEBATAN INTERNASIONAL (1894-1954)	76
A. Dinamika Politik dan Sejarah Kawasan.....	77
B. Konflik dan Sengketa Kontemporer Cina-Jepang Sengketa di Wilayah Senkaku/Diaoyu.....	84
C. Isu Sejarah Kejahatan Perang Jepang (Nanking, “Comfort Women”).....	86



D. Peran PBB dalam Konflik Cina-Jepang dan Isu Kejahatan Perang Jepang.....	88
E. Ketegangan Keamanan Regional dan Perlombaan Senjata Serta Dampaknya	91
F. Penyebab Utama Ketegangan Keamanan dan Arms Race.....	92
G. Dampak Ketegangan Keamanan dan Arms Race.....	93
H. Rangkuman	94





SELAMAT MEMBACA
SALAM LITERASI



BAB 1

DINAMIKA POLITIK ASIA TIMUR KONSEP GAGASAN NEGARA MENURUT SUN YAT SEN

Dadan Ramdan, Lutfi Cahya Nugraha, Muhamad Rizky Aditya

Sejak masa kuno hingga tahun 1912, Tiongkok diperintah oleh sistem dinasti yang turun -temurun. Dalam kajian sejarah Asia Timur, proses transisi dari monarki tradisional menuju negara modern berlangsung melalui dinamika yang kompleks dan tidak seragam. Mutmainah (2021) menjelaskan bahwa perubahan tersebut dipengaruhi oleh tekanan imperialisme Barat, krisis internal, serta munculnya gagasan pembaruan yang berusaha mengadaptasi nilai modern tanpa sepenuhnya meninggalkan tradisi lokal. Runtuhnya dinasti terakhir yang berkuasa adalah Dinasti Manchu (Qing) yang berasal dari Manchuria berkuasa dari tahun 1644-1912 Masehi. Dinasti ini dianggap sebagai dinasti asing karena tidak berasal dari etnis Han Tionghoa. Pemerintahan yang bersifat tertutup dan konservatif membuat Tiongkok tertinggal dalam menghadapi arus globalisasi serta penetrasi bangsa-bangsa Barat. Ketika pedagang-pedagang Eropa memasuki Asia, Tiongkok mulai berhubungan dagang dengan mereka, terutama dengan Inggris. Namun dalam perdagangan itu, Inggris mengalami kerugian dan menutupi kekurangannya dengan menyelundupkan candu dari India.

Tindakan Inggris tersebut menimbulkan krisis besar ketika Kaisar Manchu memerintahkan pelarangan perdagangan candu. Larangan ini memicu Perang Candu (*Opium War*) yang berakhir dengan kekalahan Tiongkok. Akibatnya, Tiongkok



harus membuka pelabuhan-pelabuhannya bagi Inggris dan negara-negara Eropa lainnya serta membayar ganti rugi besar. Kekalahan ini menjadi awal keterpurukan Dinasti Manchu, karena wilayah Tiongkok terbagi menjadi daerah-daerah pengaruh Barat.

Kekecewaan terhadap pemerintahan yang lemah dan tunduk pada bangsa asing melahirkan perasaan nasionalisme baru di kalangan kaum terpelajar Tionghoa. Berbagai pemberontakan seperti *Taiiping Rebellion* (1850-1864) dan *Boxer Rebellion* (1900) muncul sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah Manchu dan intervensi Barat. Namun, gerakan-gerakan ini belum berhasil menyatukan rakyat dalam ide nasional yang modern.

Pada awal abad ke-20, muncul tokoh revolusioner yang mampu menyatukan berbagai gerakan reformis dan nasionalis dialah Dr. Sun Yat Sen. Sebagai tokoh sentral yang tidak hanya memimpin gerakan revolusioner, tetapi juga merumuskan gagasan konseptual tentang negara modern yang berakar pada pengalaman historis Tiongkok sekaligus terbuka terhadap pengaruh pemikiran Barat, Sun Yat Sen dipandang sebagai figur penting karena gagasannya mampu menjawab krisis multidimensional yang dihadapi Tiongkok pada akhir abad ke-19, mulai dari kelemahan politik internal, ketertinggalan ekonomi, hingga tekanan imperialisme asing. Menurut Suryani (2016), pemikiran Sun Yat Sen menjadi titik awal lahirnya nasionalisme modern di Tiongkok, karena ia berhasil mengartikulasikan kesadaran kebangsaan sebagai dasar pembentukan negara yang berdaulat. Nasionalisme yang dikembangkan Sun Yat Sen tidak hanya bersifat anti-asing, tetapi juga diarahkan pada pembentukan identitas kolektif



yang mampu menggantikan loyalitas tradisional terhadap dinasti.

Gagasan utama Sun Yat Sen dirumuskan dalam Tiga Prinsip Rakyat (*San Min Chu-i*) yakni Nasionalisme (*Min Tsen*), Demokrasi (*Min Chu*), dan Sosialisme (*Min Sheng*). Rustamana et al. (2023) menegaskan bahwa melalui Tiga Prinsip Rakyat, Sun Yat Sen berupaya membangun sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama negara, sekaligus mengoreksi kelemahan sistem feodal yang telah kehilangan legitimasi moral dan politiknya. Gagasan ini menjadi ideologi utama dalam revolusi 1911 yang berhasil menggulingkan Dinasti Manchu dan mendirikan Republik Tiongkok.

Bab ini menempatkan Sun Yat Sen sebagai peletak dasar transformasi politik Tiongkok modern dengan menelusuri konteks historis kemunculannya, formasi intelektual pemikirannya, serta makna Tiga Prinsip Rakyat sebagai konsep kenegaraan. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini menjadi landasan konseptual untuk memahami perkembangan politik Tiongkok pada fase berikutnya, ketika gagasan-gagasan tentang negara, rakyat, dan keadilan sosial mengalami reinterpretasi yang lebih radikal.

A. Kondisi Sosial-Politik Tiongkok Menjelang Akhir Dinasti Manchu

Menjelang akhir abad ke-19, kondisi sosial-politik Tiongkok berada di titik krisis. Pemerintahan Dinasti Manchu (Qing) kehilangan legitimasi setelah kekalahan beruntun dalam berbagai perang melawan kekuatan asing. Perang Opium/Candu (1839–1842) menjadi titik balik kehancuran politik dan ekonomi Tiongkok. Akibat kekalahan itu, Tiongkok



harus menandatangani Perjanjian *Nanking* yang membuka pelabuhan-pelabuhan bagi Inggris dan memaksa kaisar membayar ganti rugi besar. Perang Opium kedua kembali meletus pada 1856 dan semakin melemahkan kedaulatan Tiongkok. Kekaisaran dipaksa menerima lebih banyak konsesi, termasuk legalisasi opium dan kehadiran diplomatik Barat.



Gambar 1. Ilustrasi Pecang Opium

(<https://priangan.com/perang-opium-dan-awal-campur-tangan-barat-dalam-dinamika-kekaisaran-tiongkok/>)

Pemerintah Manchu yang konservatif dan tertutup gagal menanggapi perubahan dunia. Ketika bangsa Jepang memulai modernisasi melalui Restorasi Meiji (1868), Tiongkok tetap mempertahankan sistem birokrasi tradisional yang menolak pembaruan. Akibatnya, negara ini tertinggal dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer. Sejarawan (Zhang et al., 2018) mencatat bahwa pada awal abad ke-20 rasa malu nasional akibat kekalahan militer menjadi bahan bakar utama munculnya kesadaran baru di kalangan kaum terpelajar.

Awal abad ke-20, Tiongkok menghadapi krisis multidimensional yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi. Sistem kekaisaran yang telah bertahan selama



berabad-abad menunjukkan ketidakmampuan dalam merespons tantangan modernitas, terutama akibat tekanan imperialisme Barat dan melemahnya kontrol negara terhadap wilayahnya sendiri. Spence (1991) menjelaskan bahwa runtuhnya Dinasti Qing bukan sekadar peristiwa pergantian rezim, melainkan puncak dari akumulasi krisis struktural yang telah lama menggerogoti fondasi negara tradisional Tiongkok. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kebutuhan mendesak akan gagasan baru mengenai negara dan pemerintahan, yang menjadi konteks historis munculnya pemikiran-pemikiran modern di Tiongkok.

Pemberontakan Taiping dan Boxer menunjukkan meningkatnya ketegangan sosial akibat krisis politik dan ekonomi di akhir Dinasti Qing. Upaya pembaruan kemudian dilakukan oleh Kaisar Guangxu melalui *Hundred Days Reform* pada 1898 yang bertujuan mendorong modernisasi negara. Namun, reformasi ini gagal karena kuatnya perlawanan kelompok konservatif di istana yang dipimpin oleh Permaisuri Dowager Cixi, sehingga sebagian besar kebijakan reformis dibatalkan dan kaisar kehilangan kekuasaan politiknya (Britannica, n.d.).

Dari situ, muncul kesadaran bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa adalah mengganti sistem monarki dengan pemerintahan republik. Kusmayadi (2018) menjelaskan bahwa kondisi ini melahirkan kesadaran nasional baru di kalangan kaum terpelajar yang memandang sistem dinasti sebagai hambatan utama bagi kemajuan Tiongkok. Maka lahirlah generasi intelektual baru yang berpikir secara modern dan revolusioner di antaranya Sun Yat Sen, yang kemudian dikenal sebagai “Bapak Bangsa Tiongkok”.



B. Sun Yat Sen Sebagai Tokoh Pemikir Politik

Sun Yat Sen muncul sebagai tokoh pembaharu yang pemikirannya dipengaruhi oleh pengalaman lintas budaya dan pendidikan Barat di Hong Kong dan Hawaii, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai Konfusianisme dan etika Tiongkok tradisional. Karena itu, ia berusaha memadukan dua dunia (rasionalitas Barat dan moralitas Timur). Berbeda dengan elite Qing yang cenderung mempertahankan tradisi feodal, Sun Yat Sen mengembangkan pandangan kritis terhadap sistem monarki absolut yang dianggap sebagai sumber utama kemunduran Tiongkok. Menurut Suryani (2016), Sun Yat Sen melihat bahwa pembentukan negara modern mensyaratkan merupakan perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan dan hubungan antara negara dan rakyat.



Gambar 2. Sun Yat Sen

(<https://daily.jstor.org/remembering-sun-yat-sen-abroad/>)

Pemikiran Sun Yat Sen tidak bersifat imitasi semata terhadap Barat. Ia melakukan sintesis antara nilai-nilai modern seperti republik dan demokrasi dengan realitas sosial Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan kenegaraannya berakar pada konteks lokal, meskipun terbuka terhadap pengaruh global.



Dalam historiografi Asia Timur, Sun Yat Sen diposisikan sebagai tokoh pembaharu yang menjembatani sistem kekaisaran tradisional dengan konsep negara modern berbasis nasionalisme dan republik, sehingga menempatkannya sebagai figur transisional dalam sejarah Tiongkok modern (Rustamana et al., 2023; Suryani, 2008).

C. Tiga Prinsip Rakyat sebagai Konsep Negara

Tiga Prinsip Rakyat (*San Min Chu-i*) merupakan inti gagasan Sun Yat Sen dalam merancang negara modern Tiongkok. Melalui prinsip ini, Sun Yat Sen berusaha memadukan nilai-nilai tradisional masyarakat Tiongkok dengan gagasan kenegaraan modern yang berkembang di Barat. Ia tidak meniru sistem politik Barat secara langsung, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan budaya Tiongkok yang menekankan keseimbangan, harmoni, dan etika sosial dalam kehidupan bernegara.

1. *Min Tsen* (Nasionalisme atau Prinsip Kebangsaan)

Prinsip ini lahir dari semangat anti-kolonial dan anti-dinasti asing. Sun Yat Sen melihat bahwa Dinasti Manchu merupakan simbol penjajahan internal karena berasal dari etnis Manchu, bukan Han. Dalam karya *The Three Principles of the People* (n.d.), Sun Yat Sen menyatakan bahwa salah satu tujuan revolusinya adalah membentuk nasionalisme yang kuat bagi bangsa China dan membebaskan negara dari dominasi asing, sehingga persatuan nasional menjadi syarat utama tercapainya pemerintahan yang mandiri.

Namun nasionalisme Sun bukanlah etnosentrisme sempit. Ia mengubah maknanya menjadi konsep "*Union of Five Races*"



(Han, Manchu, Mongol, Hui, dan Tibet), yaitu persatuan multi-etnis dalam satu negara. Zhang et al. (2018) menyebut bahwa evolusi nasionalisme Sun bergerak dari eksklusivitas etnis menuju ide integratif kebangsaan yang modern.

2. *Min Chu* (Demokrasi atau Prinsip Kedaulatan Rakyat)

Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sun Yat Sen mengadopsi konsep demokrasi konstitusional dari Barat, tetapi ia menyadari bahwa struktur masyarakat Tiongkok memerlukan adaptasi khusus. Ia kemudian merancang sistem pemerintahan lima kekuasaan (*Wuquan*): eksekutif, legislatif, yudikatif, pemeriksaan (*control yuan*), dan pengawasan pegawai (*examination yuan*).

Model ini merupakan gabungan antara sistem tiga cabang kekuasaan ala Montesquieu dan tradisi birokrasi meritokratis Tiongkok kuno. Dirlik (1986) menjelaskan bahwa pemikiran revolusioner Tiongkok menjelang Revolusi 1911 berkembang sebagai respons terhadap krisis negara dan dominasi asing, sehingga demokrasi dipahami bukan hanya sebagai mekanisme politik, melainkan sebagai alat transformasi etis dan sosial. Dengan demikian, konsep demokrasi Sun Yat Sen dapat dipahami sebagai upaya membangun tatanan pemerintahan yang efektif sekaligus bermoral, sejalan dengan tradisi intelektual revolusioner pada masanya.

3. *Min Sheng* (Sosialisme atau Prinsip Penghidupan Rakyat)

Prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Sun menganggap bahwa kemerdekaan politik tidak berarti tanpa kesejahteraan ekonomi. Ia terinspirasi oleh



gagasan *social democracy* dan ekonomi moral Henry George tentang pajak tanah.

Analisis Wang (2014) menunjukkan bahwa pemikiran *Min Sheng* merupakan sintesis nilai tradisional Tiongkok dengan pemikiran modern tentang kesejahteraan rakyat. Kajian lain oleh Thi Mong (2024) juga menunjukkan bahwa prinsip *Ming Sheng* dapat dijadikan model kebijakan kesejahteraan di Asia modern, karena menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

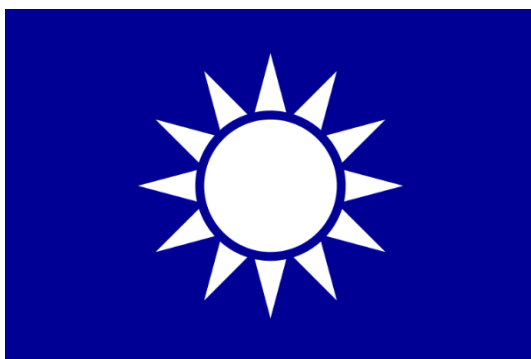
Ketiga prinsip ini bukan berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Sun Yat Sen menegaskan bahwa tanpa nasionalisme tidak ada persatuan, tanpa demokrasi tidak ada kebebasan, dan tanpa Sosialisme/kesejahteraan sosial tidak ada keadilan. Itulah sebabnya Tiga Prinsip Rakyat menjadi landasan ideologis utama bagi pembentukan Republik Tiongkok pada 1912.

D. Fase awal terbentuknya Republik China

Realisasi gagasan kenegaraan Sun Yat Sen dalam praktik politik awal Republik Tiongkok menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial-politik. Keberhasilan Revolusi 1911 memang menandai runtuhnya kekuasaan Dinasti Qing, tetapi transisi menuju negara republik modern tidak berlangsung secara linier para pemimpin revolusi mengadakan pertemuan di Nanjing untuk membentuk Republik Cina dan merekan sepakat menunjuk Sun Yat Sen sebagai presiden Sementara. Pada tanggal 25 Agustus 1912 Partai Kuomintang (KMT) secara resmi didirikan oleh Sun Yat Sen di Beijing. Pemerintahannya baru lahir dalam kondisi institusional yang rapuh, ditandai oleh lemahnya otoritas pusat, konflik elite



politik, serta dominasi kekuatan militer regional. Britannica, (n.d.) mencatat bahwa pemerintahan pusat di Beijing gagal membangun kontrol yang efektif atas seluruh wilayah Tiongkok, yang kemudian memicu pecahnya kekuasaan politik ke dalam faksi-faksi regional dan militer. 10 Maret 1912, Sun Yat sen mengundurkan diri dari Presiden Republik Cina karena lemahnya kekuasaan militer dan tekanan dari Yuan Shih Kai.



Gambar 3. Kuomintang

(https://www.wikiwand.com/id/articles/Langit_Biru_dengan_sebuah_Matahari_Putih#/media/File:Naval_Jack_of_the_Republic_of_China.svg)

Setelah Yuan Shih Kai membubarkan Partai Kuomintang pada 1913, reorganisasi diadakan di Tokyo pada 1915 dengan nama Partai Revolusioner Bangsa Tionghoa (*Chun Hun Kuo Min Tang*). Setelah Yuan Shih Kai meninggal pada 6 Juni 1916, partai ini aktif dalam parlemen. Pemerintahan dijalankan oleh Warlord, panglima militer yang menguasai wilayah tertentu. Atas dukungan para warlord di wilayah Selatan, Sun Yat Sen mendirikan pemerintahan di Guangzhou pada tahun 1917. Pada 10 Oktober 1919 mengadakan sidang di Shanghai untuk merubah nama partai revolusioner tersebut menjadi Partai



Kuomintang juga mengikutsertakan kalangan pelajar, diantaranya pengikut komunisme, atas anjuran Uni Soviet agar kalangan komunisme bergabung untuk menyelamatkan revolusi. Kuomintang berhasil membangun Angkatan perang yang kuat, bahkan buruh dan tani untuk berperang melawan para Warlord di utara. Pada tanggal 12 maret 1925, Sun Yat Sen meninggal, digantikan oleh Chiang Kai Shek.

Sun Yat Sen lebih berperan sebagai perumus ide dan arah kenegaraan dibandingkan sebagai penguasa yang memiliki kekuatan politik dan militer untuk menjalankan programnya secara efektif. Dalam kajian sejarah Asia Timur di Indonesia, Sun Yat Sen diposisikan sebagai tokoh pemikir transisional yang merumuskan gagasan negara modern di tengah runtuhnya sistem kekaisaran, tetapi tidak memiliki kondisi politik yang memadai untuk merealisasikannya secara langsung. Mutmainah (2021) menjelaskan bahwa republik awal Tiongkok lahir dalam situasi krisis multidimensional, ditandai oleh lemahnya institusi negara dan konflik elite, sehingga gagasan-gagasan modern cenderung berfungsi sebagai pedoman normatif daripada kebijakan operasional. Oleh karena itu, pemikiran Sun Yat Sen perlu dipahami sebagai fondasi konseptual yang membuka jalan bagi eksperimen politik berikutnya, bukan sebagai proyek kenegaraan yang selesai dalam satu fase sejarah.

E. Warisan Pemikiran Sun Yat Sen

Warisan pemikiran Sun Yat-sen bukan sekadar catatan sejarah, melainkan fondasi ideologis yang memiliki daya hidup jangka panjang dalam narasi Tiongkok modern. Sebagai tokoh transisional, Sun Yat Sen berhasil merumuskan sintesis antara



nilai-nilai tradisional Tionghoa dengan sistem demokrasi Barat, yang kemudian menjadi rujukan utama bagi Kuomintang (KMT) dan bahkan tetap dihormati melampaui sekat-sekat ideologi pasca-revolusi. Dalam historiografi Asia Timur, ia secara konsisten diakui sebagai "Bapak Bangsa" (*Guofu*) yang meletakkan cetak biru pertama bagi pembentukan negara modern yang berdaulat (Agung, 2012).

Lebih jauh lagi, pemikiran Sun Yat-sen memicu perdebatan intelektual yang berkelanjutan mengenai arah pembangunan bangsa. Ketika Tiongkok menghadapi gelombang transformasi radikal pada pertengahan abad ke-20, prinsip *San Min Chu-i* tetap menjadi parameter penting untuk mengukur kontinuitas dan perubahan dalam konsep kenegaraan. Meskipun ia wafat pada tahun 1925 sebelum sempat menyaksikan penyatuan Tiongkok secara utuh, kematiannya justru mengkristalisasi gagasannya menjadi sebuah doktrin yang sakral.

Prinsip-prinsipnya Nasionalisme, Demokrasi, dan Kesejahteraan Rakyat bertransformasi menjadi pengikat identitas politik yang unik. Hal ini terbukti dari bagaimana kedua belah pihak di Selat Taiwan (Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok) sama-sama mengklaim warisan politik Sun Yat-sen sebagai legitimasi modernitas mereka. Sebagaimana dicatat oleh Kusmayadi (2018), keruntuhan sistem kekaisaran Manchu menyisakan ruang hampa kekuasaan yang hanya bisa diisi oleh visi kenegaraan Sun Yat-sen yang mampu merangkul kemajemukan etnis dan aspirasi kemajuan ekonomi. Dengan demikian, signifikansi pemikirannya terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka kerja bagi Tiongkok untuk bertransformasi dari sebuah "kekaisaran yang rapuh" menjadi "negara bangsa yang tangguh" di panggung global.



F. Rangkuman

Perubahan politik di Tiongkok dari sistem monarki tradisional menuju negara modern tidak terjadi secara sederhana. Proses ini lahir dari tumpukan krisis yang saling berkaitan, mulai dari melemahnya Dinasti Qing secara internal hingga tekanan kuat dari kekuatan imperialis asing. Runtuhnya Dinasti Qing pada tahun 1912 menjadi titik balik penting karena menandai berakhirnya legitimasi kekuasaan kekaisaran yang selama berabad-abad menopang struktur politik Tiongkok. Dalam situasi inilah gagasan-gagasan revolusioner Sun Yat Sen muncul sebagai respons terhadap keterbelakangan politik dan ekonomi yang dianggap menghambat kemajuan bangsa.

Sun Yat Sen tidak hanya tampil sebagai tokoh perlawanan terhadap sistem lama, tetapi juga sebagai perumus arah baru bagi Tiongkok. Ia menyusun kerangka pemikiran yang mencoba menjembatani rasionalitas politik Barat dengan nilai-nilai moral Timur yang telah lama hidup dalam masyarakat Tiongkok. Sintesis tersebut dituangkan dalam konsep Tiga Prinsip Rakyat atau *San Min Chu-i*, yang menjadi fondasi ideologis bagi pembentukan negara baru. Melalui prinsip Nasionalisme (Min Tsen), Demokrasi (Min Chu), dan Sosialisme (Min Sheng), Sun Yat Sen menempatkan rakyat sebagai pusat kehidupan bernegara, bukan lagi sekadar objek kekuasaan seperti dalam sistem kekaisaran.

Dalam praktiknya, penerapan gagasan-gagasan tersebut pada masa awal Republik China tidak berjalan mulus. Ketidakstabilan politik, lemahnya institusi negara, serta dominasi kekuatan militer regional menjadi hambatan nyata yang membatasi realisasi cita-cita tersebut. Namun demikian, pemikiran Sun Yat Sen tetap memiliki arti historis yang kuat.

Sebagai figur transisi, ia berhasil meletakkan dasar konseptual bagi perubahan Tiongkok dari negara kekaisaran yang rapuh menuju negara bangsa modern yang berdaulat. Oleh sebab itu, ide-ide Sun Yat Sen tidak berhenti sebagai catatan sejarah semata, melainkan terus menjadi rujukan penting dalam memahami arah perkembangan politik Tiongkok hingga masa-masa berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, L. (2012). *Sejarah Asia Timur 2*. Yogyakarta: Ombak.
- Britannica, E. (n.d.-a). *History of China: The early republican period*. Britannica.
<https://www.britannica.com/topic/history-of-China/The-early-republican-period>
- Britannica, E. (n.d.-b). *Hundred Days of Reform*. Britannica.
<https://www.britannica.com/event/Hundred-Days-of-Reform>
- Dirlik, A. (1986). Vision and Revolution: Anarchism in Chinese Revolutionary Thought on the Eve of the 1911 Revolution. *Modern China*, 12(2), 123–165.
<https://doi.org/10.1177/009770048601200201>
- Kusmayadi, Y. (2018). Sejarah Runtuhnya Dinasti Mantsu Awal Abad Ke 20. *Jurnal Artefak*, 5(2), 63–70.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ja.v5i2.1938>
- Mutmainah, A. (2021). *Peradaban Asia Timur: Perjalanan sejarah Asia Timur dari peradaban kuno hingga modern*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rustamana, A., Mustakimah, D., Fatmala, M., Fahmi, M., Hafiza, I., & Ammara, M. F. (2023). Deskripsi dan Analisis Tentang Peranan Sun Yat Sen dan Jalannya Revolusi China. *Dewaruci: Jurnal Sejarah Dan Pengajarannya*, 2(2), 12–18.
- Spence, J. D. (1991). The search for modern China. In *International Affairs* (2nd editio, Vol. 67, Issue 3). W. W. Norton & Company. <https://doi.org/10.2307/2622048>



- Suryani. (2008). Menelusuri Semangat Nasionalisme Di Tiongkok. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 13(2), 79–91.
- The Three Principles of the People*. (n.d.). Encyclopaedia Britannica. Retrieved October 24, 2025, from <https://www.britannica.com/event/Three-Principles-of-the-People>
- Thi Mong, T. N. (2024). “The Principle of Livelihood” by Sun Yat-sen and Its Significance for Social Justice and Happiness Values in Vietnam Today. *Journal of Asian Development*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.52941/jad.v10i1.54>
- Wang, M. (2014). A Brief Analysis of Chinese Characteristics Implied in Sun Yat-sen’s People’s Livelihood Thinking. *Advances in Social Sciences*, 03(04), 100–105. <https://doi.org/10.12677/ass.2014.34013>
- Zhang, J., Chen, Y., & Ying, W. (2018). The Evolution of sun Yat-sen’s Nasionalism and Nation-state Concept. *Journal of International Studies*, 8(2), 76–108. <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis/article/view/146861>



BAB 2

LOMPATAN CINA JAUH KE DEPAN OLEH MAO ZEDONG

Irma Dwi Kartika, Mutiara Alia Nafilah, Dena Fiorena

A. Latar Belakang Historis dan Kondisi Awal Republik Rakyat Tiongkok

Pada pertengahan abad ke-20, Republik Rakyat Tiongkok yang baru berdiri pada 1 Oktober 1949 menghadapi tantangan besar untuk membangun fondasi ekonomi nasional setelah perang saudara panjang dan pendudukan Jepang. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, Partai Komunis Tiongkok (PKC) berhasil menyatukan wilayah daratan Tiongkok, namun negara ini masih berstatus agraris dengan 80% penduduknya bergantung pada pertanian subsisten dan tingkat industrialisasi yang sangat rendah. Produksi baja nasional pada tahun 1952 hanya mencapai 1,35 juta ton, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju seperti Uni Soviet (29 juta ton) dan Amerika Serikat (84 juta ton). Kondisi ini mendorong Mao untuk mencari jalan pintas menuju modernisasi tanpa harus mengikuti tahapan perkembangan kapitalis ala Barat atau model Soviet yang dianggap terlalu birokratis dan lambat.



Gambar 4. Logo Partai Komunis Cina

mailto:https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Tiongkok#/media/Berkas:Danghui.svg

Pada tahun 1958, Mao Zedong meluncurkan kebijakan *Great Leap Forward* atau *Lompatan Jauh ke Depan* sebagai respons terhadap krisis ideologis dan ekonomi internal PKC. Kebijakan ini bukan sekadar program pembangunan, melainkan visi revolusioner untuk "melompat" dari masyarakat agraris langsung menuju komunisme penuh dalam waktu singkat. Dengan slogan "**lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih hemat**", Mao mengajak seluruh rakyat Tiongkok termasuk petani, buruh, dan intelektual untuk terlibat dalam mobilisasi massa skala nasional. Ciri khas kebijakan ini adalah pembentukan **komune rakyat** (people's commune), **produksi baja rumahan** melalui tungku-tungku desa, dan **kolektivisasi pertanian** secara paksa. Namun, di balik ambisi tersebut, *Great Leap Forward* justru menjadi salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern, yang dikenal sebagai *Great*



Chinese Famine (1959–1961) dengan korban jiwa diperkirakan antara 20-45 juta orang akibat kelaparan, malnutrisi, dan kekerasan sistemik. Tulisan ini relevan untuk dipelajari karena *Great Leap Forward* tidak hanya mencerminkan kegagalan perencanaan sentral, tetapi juga menunjukkan bahaya dari **kepemimpinan karismatik yang anti-ilmiah, penekanan kritik, dan distorsi data untuk tujuan politik**. Di Indonesia, pelajaran dari kasus ini dapat menjadi cerminan dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama dalam konteks industrialisasi, pemberdayaan desa, dan pengelolaan sumber daya manusia.

B. Runtuhnya Pemerintahan Beiyang dan Era Panglima Perang (1912–1928)

Setelah Revolusi Xinhai 1911, Republik Tiongkok lahir dengan Sun Yat-sen sebagai presiden sementara, tetapi kekuasaan segera diambil alih Yuan Shikai. Ketika Yuan meninggal mendadak pada 6 Juni 1916, tidak ada lagi figur yang cukup kuat untuk mempersatukan berbagai faksi militer Beiyang. Akibatnya, Tiongkok terpecah menjadi puluhan wilayah otonom yang dikuasai panglima perang (dujun). Menurut James E. Sheridan (1975), “the death of Yuan Shikai marked the real beginning of the warlord era in China central authority virtually disappeared, and the country fell into a condition of almost complete disunity”.





Gambar 5. Panglima Yuan shikai
https://id.wikipedia.org/wiki/Yuan_Shikai

Panglima perang bukan sekadar jenderal pemberontak, melainkan penguasa regional yang memiliki tentara tetap, bank sendiri, mata uang lokal, dan sistem pajak pribadi (termasuk pajak candu yang sangat menguntungkan). Hsi-sheng Ch'i (1976) mengidentifikasi tiga kelompok utama: (1). Zhili Clique (dipimpin Wu Peifu dan Feng Guozhang), (2). Anhui Clique (Duan Qirui), (3). Fengtian Clique di Manchuria (Zhang Zuolin) Selain itu ada puluhan panglima kecil seperti Yan Xishan di Shanxi, Feng Yuxiang ("Jenderal Kristen"), dan keluarga Chen Jiongming di Guangdong. Periode 1916–1928 ditandai perang antar-klik yang terus-menerus: Perang Zhili



Anhui (1920), Perang Zhili Fengtian Pertama (1922), dan Kedua (1924).

Persatuan Pertama KMT-PKT dan Ekspedisi Utara (1924-1928), Sun Yat-sen yang terusir dari Beijing dan Shanghai akhirnya kembali ke Canton (Guangzhou) pada 1920-1921. Pada 1923 ia menerima bantuan besar-besaran dari Uni Soviet (Comintern). Mikhail Borodin menjadi penasihat politik, dan Jenderal Vasily Blyukher (Galin) membantu reorganisasi militer. Akademi Militer Whampoa dibuka pada Mei 1924 dengan Chiang Kai-shek sebagai kepala dan Zhou Enlai sebagai direktur politik. Lulusan Whampoa menjadi tulang punggung Tentara Revolusioner Nasional (Jordan, 1976).

Pada Juli 1926, Chiang Kai-shek melancarkan Ekspedisi Utara dengan 100.000 tentara. Dalam waktu 9 bulan saja mereka merebut Wuhan, Nanchang, dan akhirnya Shanghai-Nanjing (Maret-April 1927). Keberhasilan ini luar biasa cepat karena banyak panglima perang menyerah atau bergabung demi menghindari pertempuran.

Pembantaian Shanghai 12 April 1927 dan Awal Perang Saudara, Ketika Tentara Revolusioner Nasional mendekati Shanghai, serikat buruh yang didominasi PKT mengambil alih kota (Maret 1927). Chiang yang didukung bankir Shanghai, pemilik pabrik, dan kekuatan asing (Inggris, Prancis, Jepang) memutuskan untuk menghabisi sekutu komunisnya. Pada dini hari 12 April 1927, pasukan Divisi 1 dan 2 (lulusan Whampoa) bersama geng hijau Du Yuesheng menyerang markas serikat buruh dan kantor PKT. Harold R. Isaacs (1961), saksi mata di Shanghai, menulis: "Within a few days between 5,000 and 10,000 workers and Communists were slaughtered in Shanghai alone" the Chinese revolution received its death blow in 1927" (pp. 177-182).



Peristiwa ini diikuti pembersihan di Canton, Nanjing, dan kota-kota lain. Total korban diperkirakan lebih dari 300.000 orang dalam setahun (Van Slyke, 1967). Front Persatuan Pertama berakhir total, dan PKT dipaksa masuk ke pedalaman.

Pada masa Pemerintahan Nasionalis Chiang Kai-shek atau disebut sebagai Dekade Nanjing (1927–1937), Chiang mendirikan ibu kota baru di Nanjing pada 1927 dan mengklaim sebagai pemerintahan resmi Republik Tiongkok. Secara formal, Era Panglima Perang berakhir pada 1928 ketika Zhang Xueliang di Manchuria mengibarkan bendera nasionalis (“Northeast Flag Replacement”). Namun dalam realitas, banyak panglima perang tetap mempertahankan otonomi tinggi.

Pada 1930-1934 Chiang melancarkan lima “Kampanye Penumpasan Bandit” (Encirclement Campaigns) terhadap basis Soviet Jiangxi milik Mao Zedong dan Zhu De. Kampanye pertama sampai keempat gagal total karena taktik gerilya PKT. Kampanye kelima (1933–1934) yang dipimpin Jenderal Hans von Seeckt (penasihat Jerman) menggunakan strategi blokhaus dan pemindahan paksa penduduk akhirnya berhasil memaksa PKT meninggalkan Jiangxi. Long March dimulai Oktober 1934; dari 86.000 orang yang berangkat, hanya sekitar 7.000–8.000 yang tiba di Yan’an pada Oktober 1935 (Pantsov & Levine, 2012).





Gambar 6. Mao Zedong (tengah) memimpin kaum komunis Tiongkok dalam Long March bersama Zhou Enlai (kiri) dan Zhu De (kanan), Jiangxi, Tiongkok, 1935
<https://www.britannica.com/event/Long-March>

Pada Desember 1936, Chiang Kai-shek diculik di Xi'an oleh Zhang Xueliang dan Yang Hucheng (Insiden Xi'an). Zhou Enlai yang datang bernegosiasi berhasil memaksa Chiang menerima Front Persatuan Kedua melawan Jepang tanpa syarat tertulis. Perang meletus Juli 1937 (Insiden Jembatan Marco Polo). Dalam 18 bulan pertama, Nasionalis kehilangan Shanghai, Nanjing (Pembantaian Nanjing, Desember 1937), Wuhan, dan Canton. Chiang memindahkan ibu kota ke Chongqing. Sementara itu, PKT mengembangkan basis gerilya di belakang garis Jepang (Shaanxi-Gansu-Ningxia, Jin-Cha-Ji, dll.). Pada 1945, Tentara Merah PKT sudah berkembang dari 40.000 menjadi hampir 1 juta tentara reguler ditambah 2 juta milisi (Westad, 2003).

Setelah Jepang menyerah, AS mengirim Jenderal George C. Marshall untuk menengahi. Negosiasi di Chongqing (Agustus-Oktober 1945) dan Konferensi Politik Konsultatif (Januari 1946) menghasilkan kesepakatan damai, tetapi kedua belah



pihak tidak mematikan senjata. Perang saudara total meletus lagi pada Juni 1946. Nasionalis memulai dengan keunggulan besar: 4,3 juta tentara (dibanding 1,2 juta PKT), monopoli udara, dan bantuan AS senilai lebih dari 3 miliar dolar. Namun dalam tiga tahun mereka kalah total karena:

- a. Hiperinflasi (harga beras naik 35.000 kali lipat antara 1945–1949)
- b. Korupsi massal di kalangan pejabat dan jenderal KMT
- c. Reformasi tanah PKT yang sangat populer di desa (Pepper, 1999).

Tiga kampanye penentuan PKT:

- a. Kampanye Liaoshen (Sept–Nov 1948): Manchuria jatuh
- b. Kampanye Huaihai (Nov 1948–Jan 1949): 550.000 tentara KMT musnah di Xuzhou
- c. Kampanye Pingjin (Des 1948–Jan 1949): Beijing–Tianjin direbut tanpa pertempuran besar

Pada 21 April 1949, Tentara Pembebasan Rakyat menyeberangi Sungai Yangtze. Nanjing jatuh 23 April, Shanghai 27 Mei, dan Chongqing 30 November. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok di Beijing. Chiang Kai-shek dan sekitar 2 juta pengungsi (tentara, pejabat, dan keluarga) mengungsi ke Taiwan pada Desember 1949.



C. Biografi Mao Zedong

Mao Zedong lahir di Shaosan, Hunan, Cina pada tanggal 26 Desember 1893. Ayahnya bernama Yi-chang dan ibunya seorang berasal dari keluarga Wen. Ia menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Shaosan pada tahun 1901- 1906. Sekolah Dasar di Thongsan pada tahun 1906.



Gambar 7. Mao Zedong

Melanjutkan Sekolah lanjutan di Changsa tahun 1913-1918. Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi di Beijing. Ketika Mao Zedong berusia 14 tahun, Mao Zedong menikah dengan seorang gadis bermarga Luo. Pada tahun 1920 Mao Zedong menikah dengan Yang Kai-hui yang kemudian menjadi istri keduanya. Pada tahun 1928 Mao Zedong menikah dengan He Zizhen yang merupakan istri ketiganya. Pada tahun 1939 Mao



Zedong menikahi Jiang Qing yang merupakan istri keempatnya. Mao Zedong ikut serta dalam revolusi tahun 1911 untuk meruntuhkan dinasti Qing. Pada tahun 1919 ikut serta dalam gerakan Empat Mei 1919. Memimpin Long March tahun 1934-1935 dari Jiangxi. Tahun 1935 menjadi ketua Partai Komunis. Tahun 1949 Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina. Selama menjadi pemimpin Republik Rakyat Cina, Mao Zedong menerapkan beberapa kebijakan yang berpengaruh bagi rakyat Cina. Pada tanggal 9 September 1976 Mao Zedong meninggal dunia pada usia 82 tahun di Beijing

D. Kondisi Masyarakat Cina Masa Mao Zedong tahun 1949-1960

Pada tanggal 1 Oktober 1949 Mao Zedong mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Cina di Lapangan Tiananmen. Pada awal pemerintahannya Mao Zedong menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan baru untuk membangun Cina, antara lain: a) Bidang Politik Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina terbentuk dua lembaga induk politik yaitu, negara Republik Rakyat Cina dan Partai Komunis Cina. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah Diktator Demokrasi Rakyat dan Demokrasi Sentralisme. Melakukan kampanye seratus bunga dan gerakan Anti Kanan. b) Bidang Pendidikan Pada tahun 1951 merumuskan pendidikan formal yang menekankan pada pelatihan teknik dan pembelajaran nilai sosialis yang baru. Pada tahun 1958 pada sekolah menengah ditetapkan kurikulum tambahan yang meliputi studi politik, ideology dan aritmatika. Kemudian pada sekolah kejuruan paruh waktu menetapkan kurikulum reparasi mesin dan mengemudikan traktor. Semakin lama pendidikan di Cina tidak dapat berjalan



karena para sarjana dan seluruh guru dipekerjakan menjadi pekerja kasar. c) Bidang Agama Pada tahun 1950, Partai Komunis Cina melarang seluruh aliran kepercayaan yang tidak diakui dan organisasi yang dianggap ilegal. Pada tahun 1951 ditetapkan peraturan untuk menghukum seumur hidup atau menghukum mati bagi yang melanjutkan kegiatan-kegiatan kelompok yang tidak diakui oleh pemerintah. d) Bidang Seni Dibentuk lembaga sistem sensor yang diterapkan dengan ketat terhadap penerbitan buku-buku. Pedoman penulisan diterapkan menggunakan gaya realisme Sosialis. Pada masa Lompatan Jauh ke Depan para penulis diperintahkan untuk menulis karya sastra menggunakan gaya romantisme revolusioner yang merupakan kombinasi gaya realisme sosialis dengan realisme revolusioner. Selain karya sastra, di Cina juga ditayangkan opera, film dan panggung teater yang didominasi Jiang Qing.

E. Kebijakan ekonomi era awal Mao Zedong (Reformasi Tanah, Nasionalisasi Industri)

Pada awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949, Mao Zedong menghadapi negeri dengan kondisi ekonomi yang rusak akibat perang panjang dan struktur sosial yang timpang. Fondasi ekonomi negara masih sangat bergantung pada pertanian tradisional, sementara industri modern hanya terbatas di beberapa kota besar dan banyak dikuasai modal asing. Kebijakan ekonomi yang dijalankan Mao pada era awal pemerintahannya berpusat pada dua pilar utama, yaitu reformasi tanah yang bertujuan membalik struktur kepemilikan agraria dan nasionalisasi industri yang mengalihkan kontrol ekonomi dari kapital swasta ke negara.



eformasi tanah menjadi langkah pertama dan paling fundamental dalam agenda ekonomi Mao. Kebijakan ini membongkar struktur sosial pedesaan yang selama berabad-abad dikuasai tuan tanah dan kelas elite lokal. Pendekatan yang diterapkan bukan hanya distribusi ulang tanah, melainkan juga pembentukan tatanan sosial baru. Dalam dokumen kajian agraria, proses reformasi tersebut digambarkan sebagai revolusi sosial yang memutus kekuasaan kelas tuan tanah yang telah menguasai kehidupan ekonomi pedesaan sejak era kekaisaran (Utomo, 2002)

Tanah milik tuan tanah disita dan dibagikan kepada petani miskin melalui pertemuan publik yang sering kali disertai tekanan politik dan kampanye ideologis. Banyak daerah mencatat konflik terbuka karena tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan simbol kekuasaan lokal. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi struktur ekonomi pedesaan, tetapi juga menciptakan legitimasi politik bagi Partai Komunis. Petani yang sebelumnya bekerja dalam kondisi sangat terbatas mendapatkan lahan sendiri, sehingga hubungan antara negara dan massa tani menjadi lebih kuat. Dengan demikian, reformasi agraria di era awal Mao tidak hanya menjadi kebijakan ekonomi, tetapi fondasi sosial bagi stabilitas politik negara yang baru berdiri. Setelah struktur agraria dibenahi, pemerintah beralih pada agenda besar berikutnya, yaitu nasionalisasi industri. Pada 1950-an, kebijakan nasionalisasi berjalan secara bertahap, tetapi konsisten menuju kontrol penuh negara atas sektor industri strategis. Tahap awal dimulai dengan pembentukan badan negara untuk mengatur industri berat, energi, transportasi, perbankan, dan komunikasi. Dalam kajian perekonomian awal RRT, disebutkan bahwa nasionalisasi tersebut membentuk fondasi bagi perusahaan milik negara yang kemudian menjadi pilar



pembangunan industri China selama beberapa dekade berikutnya (Yogyakarta., 2020). Banyak perusahaan swasta dimasukkan dalam skema kepemilikan bersama, lalu secara perlahan dialihkan menjadi milik pemerintah melalui mekanisme penyesuaian, integrasi administrasi, atau paksaan politik. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap struktur ekonomi perkotaan. Sebelum 1949, industri modern di kota-kota besar seperti Shanghai, Tianjin, dan Guangzhou banyak dikuasai modal asing dan kelompok kapitalis kota. Dengan nasionalisasi, kontrol industri berpindah ke negara dan birokrasi perencana yang memegang kekuasaan sentral. Nasionalisasi industri mengarahkan China membentuk sistem ekonomi terencana yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam produksi dan distribusi. Model ekonomi baru ini mengubah pola kerja, pola kepemilikan saham, serta struktur organisasi perusahaan yang sebelumnya lebih fleksibel (Hasbullah., 2018).

Nasionalisasi juga menjadi dasar pelaksanaan Rencana Lima Tahun Pertama (1953–1957), yaitu program ekonomi besar yang menekankan pembangunan industri berat dengan dukungan teknis Uni Soviet. Pertumbuhan industri bertambah cepat, terutama pada sektor baja, listrik, dan manufaktur dasar. Namun, konsekuensinya muncul ketidakseimbangan antara sektor pertanian yang masih dalam tahap konsolidasi dan kebutuhan industri yang meningkat cepat. Hal ini tampak dalam catatan bahwa pertumbuhan industri yang pesat tidak sejalan dengan kapasitas produksi pangan, sehingga tekanan terhadap sektor agraria semakin kuat (Hasbullah., 2018). Sementara itu, reformasi tanah dan nasionalisasi industri juga memicu perubahan sosial yang signifikan. Struktur masyarakat bergeser dari sistem kelas tradisional menuju skema kelas baru yang lebih sesuai dengan ideologi komunis.



Kampanye massa, pendidikan politik, dan kontrol administratif mengiringi kebijakan ekonomi tersebut. Studi kebudayaan China menggambarkan era awal Mao sebagai periode ketika negara membentuk budaya politik yang menekankan disiplin ideologis serta pengawasan sosial yang ketat (Gondomono, 2017). Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari mekanisme politik dan sosial yang menyertai pelaksanaannya. Pada akhirnya, kebijakan ekonomi era awal Mao Zedong membentuk fondasi struktural bagi perjalanan ekonomi China di fase selanjutnya. Reformasi tanah membawa perubahan radikal dalam kepemilikan agraria dan memperkuat hubungan negara dengan petani, sementara nasionalisasi industri menciptakan basis ekonomi terencana yang mendukung perkembangan industri berat. Sebelum memasuki 1958, China telah memiliki kerangka dasar negara sosialis yang kuat, meskipun di sisi lain menghadapi tantangan ketidakseimbangan sektor dan tekanan sosial akibat perubahan yang sangat cepat (Gondomono, 2017).

F. Konsep dan tujuan lompatan jauh ke depan Mao Zedong

Great Leap Forward (Lompatan Jauh ke Depan) merupakan kampanye ekonomi dan sosial ambisius yang diluncurkan oleh Partai Komunis China (PKC) di bawah kepemimpinan Mao Zedong pada tahun 1958 hingga awal 1960. Konsep ini bertujuan untuk merevolusi ekonomi China secara cepat dengan mengubah negara agraris menjadi kekuatan industri sosialis melalui mobilisasi massa skala besar, kolektivisasi pertanian, dan industrialisasi berbasis tenaga kerja rakyat.



Kebijakan ini mencakup pembentukan komune rakyat (people's communes) yang memusatkan produksi pertanian dan domestik, serta kampanye produksi baja rumahan (backyard furnaces) untuk meningkatkan output industri. Namun, implementasinya yang terburu-buru menyebabkan kegagalan besar, termasuk penurunan produksi pertanian, pemborosan sumber daya, dan kelaparan massal yang menewaskan sekitar 20-45 juta orang (Dikötter, 2010). Menurut Mao, konsep ini adalah "jalan dua kaki" (walking on two legs), yaitu menggabungkan industrialisasi berat dengan kolektivisasi agraria untuk melewati tahap kapitalisme dan langsung mencapai komunisme (Teiwes, 1993).

Tujuan utama Great Leap Forward adalah mempercepat transformasi China menjadi negara industri maju dalam waktu 15 tahun, melebihi Inggris dalam produksi baja, sambil meningkatkan output pertanian untuk mendanai industrialisasi. Mao percaya bahwa melalui semangat revolusioner dan mobilisasi kolektif, China bisa "melompat" melewati model Soviet yang lambat dan bergantung pada bantuan eksternal. Secara spesifik, targetnya mencakup peningkatan produksi baja menjadi 10,7 juta ton pada 1958 (meskipun sebagian besar tidak layak pakai) dan surplus pangan untuk ekspor. Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor dan membangun kemandirian ekonomi sosialis (Lippit, 1975). Namun, tujuan ini gagal karena kebijakan anti-"rasa aman" (anti-rightist) yang menekan kritik, menyebabkan distorsi data produksi dan alokasi sumber daya yang salah (Yang, 2008).

Slogan Politik: "Lebih Cepat, Lebih Baik, Lebih Banyak"
Slogan "lebih cepat, lebih baik, lebih banyak" (more, faster, better) menjadi moto utama kampanye ini, mencerminkan



dorongan Mao untuk percepatan produksi tanpa kompromi. Slogan ini dipromosikan melalui propaganda PKC untuk memotivasi rakyat, seperti dalam pidato Mao pada 1958 yang menekankan "lompatan besar" menuju utopia komunis. Ia digunakan untuk membenarkan pembentukan komune rakyat dan produksi baja rumahan, di mana petani dipaksa bekerja 12-16 jam sehari dengan janji hasil berlipat ganda. Namun, slogan ini juga berkontribusi pada kegagalan, karena mendorong laporan palsu produksi (misalnya, panen berlebih yang sebenarnya fiktif) dan pengabaian realitas agraria, yang memperburuk kelaparan (Zhou, 2012).

G. Implementasi Program Lompatan Jauh Cina Ke Depan

Pada tahun 1958, Mao Zedong meluncurkan kampanye besar-besaran yang dikenal 'lompatan jauh ke depan,' yakni sebuah proyek yang bertujuan untuk mentransformasi Republik rakyat China dari negara agraris menjadi negara industri sosialis dalam waktu yang singkat. Salah satu pilar utama dari kebijakan ini adalah pembentukan komune rakyat di pedesaan, yang dirancang untuk menghapus kepemilikan pribadi dan menggantinya dengan sistem kolektif yang mengintegrasikan pertanian, industri, Pendidikan dan militer dalam satu unit social-ekonomi. Komune-komune ini terdiri dari ribuan keluarga petani yang bekerja bersama di ladang kolektif, berbagi hasil panen, dan hidup dalam sistem komunal yang diatur oleh negara. Dapur umum menggantikan dapur keluarga, anak-anak dirawat secara kolektif, dan sistem kerja bergilir diterapkan dengan penilaian kerja berdasarkan poin. Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya menghapus otonomi



individu, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang sangat terpusat dan birokratis, di mana keputusan produksi dan distribusi diambil oleh pejabat partai, bukan oleh petani sendiri. Akibatnya, data hasil panen sering dilebih-lebihkan untuk menunjukkan keberhasilan politik, yang pada gilirannya menyebabkan pengambilan hasil panen secara berlebihan oleh negara dan memicu kelaparan besar antara tahun 1959 hingga 1961 yang menewaskan puluhan juta orang.

Selain reorganisasi sosial melalui komune, Mao juga mendorong industrialisasi cepat dengan memobilisasi tenaga kerja pedesaan untuk membangun tungku baja kecil atau *backyard furnaces*. Dalam upaya untuk melipatgandakan produksi baja nasional, petani dan warga desa diminta meninggalkan ladang mereka dan mengumpulkan logam bekas untuk dilebur di tungku-tungku sederhana yang dibangun di halaman rumah atau lahan terbuka. Produksi baja menjadi simbol semangat revolusioner, dan setiap desa berlomba-lomba menunjukkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Namun, baja yang dihasilkan sering kali berkualitas rendah dan tidak dapat digunakan dalam industri, sementara pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian menyebabkan penurunan drastis dalam produksi pangan. Ketidakseimbangan antara ambisi industri dan kebutuhan dasar masyarakat memperburuk krisis ekonomi dan sosial yang sudah mulai muncul akibat pembentukan komune.

Kebijakan ekonomi Mao sangat bergantung pada strategi mobilisasi massa, yang berakar pada keyakinan ideologis bahwa semangat revolusioner rakyat dapat menggantikan kekurangan teknologi dan modal. Dalam kerangka ini, rakyat dipandang sebagai kekuatan utama pembangunan, dan partisipasi kolektif dianggap lebih penting daripada efisiensi



teknis. Kampanye kerja kolektif, kompetisi antar komune, dan penetapan target produksi yang tidak realistis menjadi ciri khas pendekatan ini. Target-target tersebut sering kali ditentukan secara politis, bukan berdasarkan analisis teknis atau kapasitas produksi yang sebenarnya. Akibatnya, data produksi dlebih-lebihkan, sumber daya disalahgunakan, dan hasil akhir tidak mencerminkan kemajuan nyata. Mobilisasi massa yang tidak terencana dan tidak berbasis pada realitas ekonomi justru menciptakan kekacauan dan memperburuk kondisi kehidupan rakyat.

Dalam seluruh proses ini, Partai Komunis China memainkan peran sentral dalam pengawasan dan propaganda. Media, pendidikan, dan seni diarahkan secara ketat untuk menyebarkan ideologi Mao dan membentuk citra pemimpin sebagai tokoh visioner yang tak tergantikan. Poster revolusioner, lagu-lagu patriotik, dan cerita heroik digunakan untuk membentuk citra rakyat pekerja ideal yang loyal kepada partai dan pemimpin. Kritik terhadap kebijakan dianggap sebagai pengkhianatan, dan kampanye politik seperti Gerakan Anti-Kanan serta Revolusi Kebudayaan digunakan untuk menyingkirkan oposisi dan memperkuat kontrol ideologis. Pengawasan ketat terhadap informasi dan opini publik menciptakan iklim ketakutan dan kepatuhan, di mana rakyat tidak hanya bekerja untuk negara, tetapi juga berpikir dan berbicara sesuai dengan garis partai.

Dampak kebijakan Ekonomi Mao Zedong Kebijakan mengeluarkan mata uang baru yang disebut Renminpiao **Dampak Lompatan** pada tahun 1949 telah berhasil mengendalikan inflasi. Kebijakan yang selanjutnya yaitu Reformasi Agraria berdampak buruk bagi tuan tanah karena mereka dihukum mati dan tanahnya dirampas. Bagi para



petani kebijakan tersebut berdampak baik karena mendapatkan pembagian tanah. Dalam gerakan Tiga Anti pada tahun 1951 berdampak baik karena angka penggelapan uang menurun. Namun juga berdampak buruk karena menyebabkan perekonomian di Cina menjadi kacau. Pada gerakan Lima Anti 10 tahun 1952 akibat dari gerakan tersebut angka bunuh diri di Cina menjadi meningkat yaitu antara 200.000-300.000.

Kebijakan Sentralisasi pajak tahun 1950 memberikan pengaruh baik terhadap pendapatan pemerintah. Kebijakan Repelita I (1953-1957) memberikan pengaruh baik, pada sektor pertanian maupun industri mengalami kenaikan. Pendapatan Nasional Kotor (GNP) dan Produksi modern di Cina juga mengalami peningkatan yang besar. Kebijakan Nasionalisasi perusahaan yang ditetapkan pada tahun 1955, membawa perubahan yang besar bagi rakyat Cina. Setelah perusahaan milik swasta menjadi milik negara, pemilik perusahaan yang selama 20 tahun kedepan hanya boleh memiliki 5% dari nilai perusahaan mereka. Kemudian bekas pemilik perusahaan tersebut tetap dipekerjakan sebagai manajer dengan gaji yang besar, dan memiliki atasan seorang pejabat partai

Kebijakan Komune rakyat ditetapkan tahun 1958 memberi dampak buruk terhadap rakyat Cina karena petani mengalami kelelahan. Burung-burung mulai punah karena selalu di basmi sehingga berdampak pada terganggunya keseimbangan alam. Pada kebijakan Lompatan Besar ke Depan tahun 1958 memberikan dampak buruk terhadap Cina karena kebijakan tersebut mengalami kegagalan. Rakyat Cina menderita, kelaparan, terjadi kemiskinan bahkan menyebabkan korban berjuta korban jiwa.



H. Rangkuman

Setelah Revolusi Xinhai 1911, Republik Tiongkok berdiri, tetapi wafatnya Yuan Shikai pada 1916 memicu runtuhnya otoritas pusat dan menandai awal Era Panglima Perang. Tiongkok terpecah menjadi wilayah-wilayah otonom yang dikuasai panglima perang dengan kekuatan militer, ekonomi, dan pajak sendiri. Kondisi ini menciptakan konflik berkepanjangan hingga akhir 1920-an.

Upaya penyatuan kembali dilakukan melalui Front Persatuan Pertama antara Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dengan dukungan Uni Soviet. Melalui Ekspedisi Utara (1926–1928) yang dipimpin Chiang Kai-shek, banyak wilayah berhasil ditaklukkan. Namun, kerja sama KMT–PKT berakhir tragis dengan Pembantaian Shanghai 1927, yang menjadi awal Perang Saudara Tiongkok.

Pada masa Dekade Nanjing (1927–1937), Chiang Kai-shek memerintah secara nominal sebagai penguasa nasional, tetapi konflik internal, lemahnya pemerintahan, dan ancaman Jepang terus berlanjut. PKT di bawah Mao Zedong bertahan melalui perjuangan gerilya, terutama setelah Long March (1934–1935) yang memperkuat posisi Mao sebagai pemimpin utama PKT.

Invasi Jepang sejak 1937 memaksa terbentuknya Front Persatuan Kedua. Setelah Jepang menyerah pada 1945, perang saudara kembali meletus. Meski KMT unggul secara militer dan mendapat bantuan Amerika Serikat, PKT akhirnya menang karena dukungan massa tani, disiplin organisasi, dan keberhasilan reformasi tanah. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, sementara Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan.



Sebagai pemimpin RRT, Mao menerapkan kebijakan radikal di berbagai bidang. Reformasi tanah menghancurkan kekuasaan tuan tanah dan memperkuat dukungan petani, sementara nasionalisasi industri membentuk sistem ekonomi terencana yang dikendalikan negara. Kebijakan ini menjadi dasar pembangunan sosialis awal, meskipun menimbulkan tekanan sosial dan ketidakseimbangan ekonomi.

Pada 1958, Mao meluncurkan Great Leap Forward (Lompatan Jauh ke Depan) dengan tujuan mempercepat industrialisasi dan kolektivisasi melalui komune rakyat dan produksi baja rumahan. Program ini gagal akibat target tidak realistis, distorsi data, dan pengabaian realitas pertanian, yang berujung pada kelaparan besar 1959–1961 dengan korban jiwa puluhan juta orang.

Secara keseluruhan, periode 1911–1960 menunjukkan transformasi besar Tiongkok dari negara terpecah menuju negara sosialis terpusat. Kepemimpinan Mao Zedong membentuk fondasi politik dan ekonomi RRT, namun juga meninggalkan dampak sosial yang sangat berat akibat kebijakan-kebijakan radikal dan mobilisasi massa yang ekstrem.



Daftar Pustaka

- Ch'i, H. (1976). Warlord politics in China, 1916–1928. Stanford University Press.
- Eastman, L. E., Ch'en, J., Pepper, S., & Van de Ven, H. (1991). The Nationalist era in China, 1927–1949. Cambridge University Press.
- Isaacs, H. R. (1961). The tragedy of the Chinese revolution (2nd rev. ed.). Stanford University Press. Jordan, D. A. (1976). The Northern Expedition: China's national revolution of 1926–1928. University of Hawaii Press. McCord, E. A. (1993). The power of the gun: The emergence of modern Chinese warlordism. University of California Press.
- Pantsov, A. V., & Levine, S. I. (2012). Mao: The real story. Simon & Schuster. Pepper, S. (1999).
- Civil war in China: The political struggle, 1945–1949 (2nd ed.). Rowman & Littlefield. Sheridan, J. E. (1975). China in disintegration: The Republican era in Chinese history, 1912–1949. Free Press.
- Van Slyke, L. P. (1967). Enemies and friends: The united front in Chinese Communist history. Stanford University Press.
- Westad, O. A. (2003). Decisive encounters: The Chinese Civil War, 1946–1950. Stanford University Press.
- Dikötter, F. (2010). *Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe*. Britanica: Bloomsbury Publishing.



- Gondomono, G. (2017). *Gondomono, G. (2017). Masyarakat dan Kebudayaan Cina. Jakarta: Pusat Kajian Asia Timur. Jakarta: Pusat Kajian Asia Timur.*
- Hasbullah. (2018). Sejarah pertumbuhan perekonomian Cina. *Jurnal Humaniora Sains*, 65-67.
- Lippit, V. D. (1975). Lippit, V. D. (1975). "The Great Leap Forward Reconsidered." *Modern China*, 1(1), 92-115. JSTOR. *Modern China*, 1(1), 92-115.
- Teiwes, F. C. (1993). *Teiwes, F. C. (1993). Politics and Purges during the Great Leap Forward. M.E. Sharpe. New York : Columbia University Press.*
- Utomo, S. P. (2002). Indonesia, Tiongkok, dan komunisme 1949–1965. *Jurnal Ilmu Politik*, 75-80.
- Yang, J. (2008). *Tombstone: The Great Chinese Famine, 1958-1962. Farrar: Straus and Giroux.*
- Yogyakarta., U. (2020). *Peran Mao dalam perekonomian China era awal Republik Rakyat Tiongkok. . Yogyakarta: Repository Universitas PGRI Yogyakarta.*
- Zhou, X. (2012). *Forgotten Voices of Mao's Great Famine, 1958-1962: An Oral History. . New Haven: Yale University Press.*



BAB 3

JEPANG DI BAWAH KEKUASAAN TRIUMVIRAT 1535-1616 (Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu)

Syehan Sahid Maulana Dadan Koswara, Dewi Komalasari

Periode Sengoku atau *Zaman Negara-Negara Berperang* (sekitar abad ke-15 hingga ke-17) merupakan salah satu masa paling penuh gejolak dalam sejarah Jepang. Pada masa ini, kekuasaan politik di Jepang terpecah-pecah ke dalam wilayah-wilayah kecil yang dipimpin oleh para daimyo (tuan tanah feodal) yang saling berebut pengaruh dan wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan kekacauan sosial, politik, dan ekonomi yang berkepanjangan.

Namun, dari kekacauan tersebut muncul tiga tokoh besar yang secara berurutan membawa Jepang menuju jalan persatuan dan kestabilan, yaitu **Oda Nobunaga**, **Toyotomi Hideyoshi**, dan **Tokugawa Ieyasu**. Ketiganya dikenal sebagai *Triumvirat Jepang* karena peran penting mereka dalam membentuk fondasi negara Jepang yang bersatu dan modern.

Perjalanan ketiga tokoh tersebut tidak hanya mencerminkan perjuangan dalam bidang militer dan politik, tetapi juga menggambarkan transformasi besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya Jepang. Oleh karena itu, kajian mengenai Triumvirat Jepang menjadi penting untuk memahami proses terbentuknya negara Jepang modern dan filosofi

kepemimpinan yang melekat dalam masyarakatnya hingga kini.

Periode Sengoku atau yang dikenal sebagai *Zaman Negara-Negara Berperang* merupakan masa paling kelam dan penuh kekacauan dalam sejarah Jepang. Selama hampir satu abad, para daimyo (tuan tanah feodal) saling berperang demi kekuasaan dan wilayah. Dalam situasi politik yang tidak stabil itu, muncul tiga tokoh besar yang secara bertahap membawa Jepang menuju kesatuan dan kedamaian: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Ketiganya sering disebut sebagai *Triumvirat Jepang*, karena memiliki peran berurutan dalam proses penyatuan negara.

Tokoh pertama, Oda Nobunaga, lahir pada tahun 1534 di Provinsi Owari. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner sekaligus brutal. Nobunaga menggunakan strategi militer yang revolusioner, seperti penerapan senjata api dalam pertempuran sesuatu yang jarang dilakukan di Jepang pada masa itu. Salah satu kemenangannya yang paling terkenal adalah Pertempuran Nagashino pada tahun 1575, di mana ia berhasil mengalahkan pasukan Takeda dengan penggunaan senjata api secara teratur. Nobunaga memiliki tujuan jelas untuk mengakhiri era peperangan dan mempersatukan Jepang di bawah satu kekuasaan.

Setelah kematian Nobunaga, tongkat estafet kepemimpinan diambil oleh Toyotomi Hideyoshi, seorang jenderal yang dulunya hanya berasal dari kalangan rakyat biasa. Hideyoshi merupakan sosok yang cerdas dan karismatik. Dengan kemampuan diplomasi dan strategi militer yang matang, ia berhasil menundukkan para daimyo yang tersisa dan menyatukan seluruh Jepang pada tahun 1590. Di bawah



kepemimpinannya, Jepang mengalami reformasi sosial besar-besaran.

Tokoh terakhir dari Triumvirat Jepang adalah Tokugawa Ieyasu, yang merupakan sekutu sekaligus penerus dari Hideyoshi. Setelah wafatnya Hideyoshi pada tahun 1598, terjadi perebutan kekuasaan antara para jenderal yang pernah berjuang bersamanya. Ieyasu muncul sebagai pemenang dalam Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, yang menjadi titik balik dalam sejarah Jepang. Dua tahun kemudian, ia mendirikan pemerintahan militer baru yang dikenal sebagai *Keshogunan Tokugawa* atau *Edo Bakufu*. Di bawah kepemimpinannya, Jepang menikmati masa damai selama lebih dari dua setengah abad. Sistem pemerintahannya menekankan stabilitas, kontrol sosial, dan isolasi dari pengaruh luar.

Ketiga tokoh tersebut melambangkan tiga tahap dalam perjalanan penyatuan Jepang: Oda Nobunaga membuka jalan dengan kekuatan dan keberaniannya, Toyotomi Hideyoshi menyatukan bangsa dengan strategi dan diplomasi, dan Tokugawa Ieyasu menstabilkan negara dengan kebijaksanaan politik. Dalam budaya Jepang, ketiganya sering digambarkan melalui pepatah terkenal: "Jika burung tidak mau bernyanyi, Nobunaga akan membunuhnya, Hideyoshi akan membujuknya, dan Ieyasu akan menunggunya." Pepatah ini menggambarkan karakter, metode, dan filosofi kepemimpinan mereka masing-masing.



A. Oda Nobunaga (1535-1582)



Gambar 8. Oda Nobunaga

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Oda_Nobunaga

Lahir di Provinsi Owari, Jepang pada 1 Juni 1534, merupakan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Jepang, memainkan peran kunci dalam mengakhiri periode panjang Perang Feodal, yang dikenal sebagai Sengoku Jidai (Periode Negara-Negara Berperang). Era ini ditandai oleh fragmentasi politik dan konflik militer yang konstan, di mana baik shogun maupun kaisar hanyalah boneka yang tak berdaya. Ayahnya, Oda Nobuhide, adalah seorang *daimyo* (tuan feodal) kelas bawah yang menguasai wilayah di sekitar Kastil Nagoya. Meskipun berasal dari latar belakang yang tidak terlalu terkemuka, Nobunaga berhasil mengumpulkan kekayaan dan pasukan pengikut militer yang terhormat, membangun fondasi bagi kebangkitannya (Cartwright, 2019).

Setelah menggantikan ayahnya, Nobunaga mewarisi Provinsi Owari yang terfragmentasi dan dengan cepat menaklukkan kerabat serta keluarga utama klan. Ia berhasil menyatukan seluruh Owari di bawah kekuasaannya pada tahun 1560. Pada



bulan Juni tahun itu juga, ia mengejutkan seluruh Jepang dengan kemenangan luar biasa dalam Pertempuran Okehazama. Meskipun pasukannya hanya berjumlah 2.000 hingga 3.000 orang melawan pasukan besar Imagawa Yoshimoto yang mencapai 25.000 orang, Nobunaga melancarkan serangan mendadak yang berhasil mengalahkan musuhnya (Asep, 2025).

Kemenangan ini, yang menewaskan Yoshimoto, adalah langkah pertamanya menuju penyatuan negara. Toyotomi Hideyoshi, yang saat itu hanya seorang pembawa sandal, membedakan dirinya dalam pertempuran ini. Setelah konfrontasi tersebut, Matsudaira Tekchiyo (Tokugawa Ieyasu di masa depan) berganti pihak dan menjadi sekutu Nobunaga, yang diformalkan melalui aliansi pada 1562.

1. Reformasi Ekonomi

Sebagai diktator *de facto*, Nobunaga memulihkan pemerintahan yang stabil dengan menerapkan reformasi ekonomi baru. Ia menghapus penarikan tol di jalan-jalan dan dari serikat-serikat, kebijakan ekonomi seperti sistem *rakuichi-rakuza* dengan mendirikan pusat-pusat perdagangan bebas, dan berusaha memodernisasi ekonomi dengan melarang perdagangan barter dan menggantinya dengan pertukaran mata uang untuk mempromosikan ekonomi uang sejati.

Untuk mencegah praktik yang tidak adil, ia juga menetapkan regulasi mata uang yang menetapkan standar resmi untuk nilai tembaga, perak, dan emas. Selain itu, ia melakukan survei kadastral untuk menyederhanakan kepemilikan tanah, mempercepat administrasi, perpajakan, dan penilaian produktivitas tanah.



2. Sikap Terhadap Agama

Dalam strategi lain untuk melemahkan lawan-lawannya, Nobunaga tidak segan menghancurkan kuil Buddha manapun dan mengeksekusi pendeta-pendeta Buddha berpengaruh yang berasosiasi atau bersekutu dengan lawannya. Pada tahun 1571, ia menghancurkan biara-biara Kuil Enryaku di Gunung Hiei, markas besar sekte Tendai. Pasukan Nobunaga menyerbu benteng mereka, membakar kompleks kuil, dan membantai pria, wanita, dan anak-anak. Diperkirakan antara tiga hingga empat ribu pendeta terbunuh dalam pertumpahan darah selama seminggu (Cartwright, 2019).

Mengenai agama lain, Nobunaga mendukung misionaris-misionaris Kristen di Jepang karena menurutnya kontak dengan orang Eropa menguntungkan; serta membawa perdagangan dan teknologi seperti senjata api yang ia gunakan untuk menaklukkan.

3. Kematian

Menjelang musim semi 1582, Nobunaga telah menaklukkan Jepang tengah dan berusaha memperluas hegemoninya ke Jepang barat. Ia telah berhasil membawa hampir separuh provinsi Jepang di bawah kendalinya. Namun, hidupnya berakhir secara mendadak dan tragis dalam sebuah pengkhianatan.

Pada bulan Juni tahun itu, saat ia tinggal di Honnō-ji, sebuah kuil di Kyōto, Akechi Mitsuhide, salah satu bawahan tepercaya, memberontak dan menyerangnya dengan 13.000 tentara. Terluka dalam serangan itu dan tanpa peluang untuk melarikan diri, Nobunaga melakukan *seppuku* (ritual bunuh diri) pada 21 Juni 1582.



B. Toyotomi Hideyoshi (1537-1598)



Gambar 9. Toyotomi Hideyoshi

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Toyotomi_Hideyoshi

Toyotomi Hideyoshi lahir tahun 1536 di Nakamura. Sejak kecil Toyotomi Hideyoshi bertekad ingin menjadi seorang pemimpin Jepang. Walaupun Toyotomi Hideyoshi bukan berasal dari kaum bangsawan dan tidak berpendidikan, Toyotomi Hideyoshi tidak membiarkan segala kekurangan dalam dirinya untuk menentukan nasibnya. Ambisinya dapat tercapai menjadi seorang *daijodaijin*.

Toyotomi Hideyoshi adalah orang pertama yang mendapat gelar *daijodaijin* tanpa adanya ikatan hubungan darah atau kekeluargaan dengan kaum bangsawan. Eksistensi Toyotomi Hideyoshi dalam usahanya meneruskan visi dari Oda Nobunaga untuk mempersatukan seluruh wilayah Jepang terlihat dalam tiga tahun setelah kematian Oda Nobunaga

Beberapa tahun sebelum menjadi bawahan Oda Nobunaga, Toyotomi mengawali hidupnya dengan menjadi pedagang



keliling di usianya yang berumur 15 tahun, selain menjadi pedagang keliling Toyotomi juga melakukan beberapa pekerjaan serabutan seperti menjadi tukang cuci, penarik kereta, tukang kayu, pembuat tong, pengrajin logam, pemotong rumput dan lain-lain.

Toyotomi Hideyoshi merupakan pemimpin Jepang di zaman Azuchi Momoyama (1573-1603) yang berhasil mendirikan pemerintahan pusat setelah berhasil mempersatukan provinsi-provinsi di Jepang. Toyotomi Hideyoshi mengambil alih kekuasaan setelah peristiwa pembunuhan Oda Nobunaga oleh Akechi Mitsuhide. Toyotomi Hideyoshi yang menggantikan Oda Nobunaga, melanjutkan usahanya untuk menyatukan bangsa Jepang (Sugiarti, D.P., & Apriliani, 2017).

4. Strategi Perang Toyotomi Hideyoshi Dalam Menyatukan Jepang

a. Kepemimpinan Toyotomi Hideyoshi

Toyotomi dikenal sebagai pemersatu Jepang dengan pemikiran yang luar biasa di kenal sebagai ahli strategi dan pandai mengenali kepribadian seseorang membuat karirnya melesat lebih cepat dibanding samurai lain

Dengan strateginya ia mencoba menyeimbangkannya dan ia pandai merebut hati seseorang yang paling menonjol dari dirinya, pengetahuannya dalam memahami nilai-nilai samurai dan visinya tentang masa depan membuatnya lebih mudah untuk menarik orang-orang hebat disekitarnya

b. Membangun Kembali Benteng Kiyosu

Pada saat keluarga Imagawa hendak melakukan Invasi ke daerah Nobunaga terdapat satu benteng yang harus segera



diperbaiki untuk menghalau serangan musuh. Toyotomi dengan gagasannya menawarkan kepada Nobunaga untuk membangun kembali benteng itu dengan waktu yang singkat yaitu dengan waktu 3 hari.

Dengan Strategi Komando dan Kendalinya ini akhirnya benteng selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, Keberhasilan Toyotomi dalam membangun benteng dalam waktu singkat membuatnya naik pangkat menjadi prajurit.

c. Membangun Benteng Tsunomata

Pada tahun 1566 Nobunaga melancarkan serangan ke provinsi Mino namun mendapatkan perlawanan yang cukup berat. Toyotomi telah mengenal daeah ini sebelumnya sehingga dia dengan mudah memperhitungkan langkah-langkah strategis untuk membangun benteng dengan cepat dan efisien. Toyotomi memerintahkan mereka untuk membuat konstruksi siap pasang, jadi ketika bahan terkumpul hanya tinggal menyatukannya menjadi sebuah benteng. Karena prestasinya Oda Nobunaga menjadikannya Jendral dan mengepalai sebuah berigade yang terdiri dari 3.000 orang.

d. Mengambil Alih Benteng Inabayama

Pada tahun 1567 Nobunaga melakukan serangan ke Provinsi Mino, Diantara strateginya kali ini adalah Toyotomi mengirimkan mata-mata untuk membuat 3 samurai hebat tersebut membelot dan salah seorang jendral hebat Mino untuk masuk ke dalam aliansinya, Dengan strategi ini Toyotomi membuat musuh lemah dari dalam. Akhirnya Toyotomi dan beberapa orang terdekatnya dapat memasuki benteng utama dan diam-diam membuka gerbang untuk pasukannya agar dapat memasuki benteng



5. Kebijakan Politik Toyotomi Hideyoshi

Sampai tahun 1585 Toyotomi sudah hampir menyatukan seluruh wilayah Jepang. setelah mendapatkan gelar wakil kaisar Toyotomi demi memudahkan jalannya dalam mengurus negara Toyotomi melakukan beberapa hal sebagai berikut (Anggara, 2020) :

- a. Membentuk dewan 5 pengurus yang ditugaskan untuk mengurus hubungan dalam negeri. Instruksi yang diberikan:
 - 1) Jangan hanya membela yang kaya
 - 2) Jangan membenci yang miskin
 - 3) Jangan menerima suap
 - 4) Jangan menunda pekerjaan yang dapat segera diselesaikan
- b. Pada tahun 1588 diberlakukan kebijakan penyitaan senjata untuk menguatkan persatuan nasional
- c. Diadakan sensus nasional dan menerapkan peraturan yang memaksa petani untuk membersihkan ronin dari kampung mereka.
- d. Diadakan pengukuran kepemilikan tanah dan ladang serta jumlah panen yang dihasilkan.
- e. Memperbaiki infrastruktur negara, dengan membangun prasaran jalan dan kanal yang lebih baik f. Diterapkannya reformasi mata uang dan mengaharmkan perdagangan budak.



6. Warisan Toyotomi Hideyoshi

Toyotomi Hideyoshi wafat pada tahun 1598, meninggalkan putranya yang masih muda, Hideyori, sebagai penerusnya. Namun, persaingan politik di antara para bupati yang ditunjuk Hideyoshi memicu perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, Tokugawa Ieyasu muncul sebagai pemenang dan mendirikan Keshogunan Tokugawa, yang memerintah Jepang selama lebih dari 250 tahun.

Meskipun dinastinya berumur pendek, pengaruh Hideyoshi terhadap sejarah Jepang sangat besar. Penyatuan negara, reformasi sosial dan politik, serta perlindungan budayanya turut membentuk arah perkembangan Jepang selama berabad-abad berikutnya. Kini, Hideyoshi tetap menjadi tokoh yang dikenang dalam sejarah Jepang, dikenang karena kecemerlangan strategis, kepemimpinan, dan jejak tak terhapuskan yang ditinggalkannya.



C. Tokugawa Ieyasu (1543-1616)



Gambar 10. Tokugawa Ieyasu

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Tokugawa_Ieyasu2.JPG

Lahir di Okazaki pada tahun 1543 dan meninggal dunia di Shizuoka pada 1 Juni 1616 pada umur 73 tahun merupakan seorang penguasa militer (Shogun) di Jepang pada tahun 1600-an. Rezimnya dikenal sebagai zaman Edo karena dia memindahkan pemerintahannya ke Edo (Tokyo), dan menjadi era Shogun terakhir di Jepang. Tokugawa Ieyasu adalah seorang Daimyo, Panglima Samurai. Ia berasal dari keturunan ningrat Jepang, dari klan Tokugawa.

Setelah Hideyoshi berhasil menyatukan Jepang, kemudian muncullah penguasa baru dari keluarga Tokugawa, yaitu Tokugawa Ieyasu yang muncul sebagai penguasa baru setelah kemenangannya dalam perang Sekigahara mengalahkan keluarga Mitsunari yang merupakan pendukung dari keluarga penguasa terdahulunya Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1600. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya Ieyasu memiliki pandangan yang sama dengan pendahulunya



Hideyoshi mengenai pelarangan masuknya agama Kristen, yang kemudian pada masa Tokugawa ini ditetapkan menjadi peraturan nasional pada tahun 1612.

Larangan agama ini kemudian disusul dengan adanya pelarangan orang Jepang ke luar negeri pada tahun 1635. Kebijakan lainnya yaitu mengetatkan pengawasan dagang dengan Negara lain pada tahun 1639. Bangsa Eropa yang diizinkan berdagang ke Jepang hanyalah orang Belanda melalui kantor dagangnya di Dezima dan Nagasaki. Kebijakan isolasi inilah yang kemudian dikenal dengan nama Sakoku (Politik Isolasi).

1. Kebijakan Politik

Selama periode Keshogunan Tokugawa tepatnya di tahun 1603-1867, Jepang dikenal dengan kebijakan isolasi yang disebut *Sakoku*. Istilah *Sakoku* berarti Negara terkunci, atau Negara terantai. Politik luar negeri dengan cara isolasi merupakan cara bertahan yang dilakukan Tokugawa untuk membentuk masyarakat Jepang agar memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintahan Jepang terutama Kaisar Jepang dan sebagai upaya pemerintah Jepang dalam menjauhi pengaruh masyarakat Jepang dari dunia luar, sehingga membentuk Jepang menjadi negara feodalisme yang kuat. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masa politik isolasi tersebut berlangsung.

2. Peran Daimyo

Bagi Ieaysu Kelangsungan hidup dari para daimyo ini merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian utama, karena berdasarkan sejarah setiap pemberontakan dan pertempuran yang terjadi pada masa-masa sebelumnya selalu melibatkan kekuatan dari para daimyou. Dengan begitu Ieyasu



meminta para daimyou untuk memberikan pengabdian penuh dan kesetiaan kepadanya. Ieasu melarang para daimyou untuk membentuk aliansi antar sesamanya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penghianatan ataupun penyerangan dari kelompok-kelompok yang ingin menyerangnya.

Berikut adalah beberapa point peraturan yang diberlakukan pada masa politik isolasi berlangsung (Widarahesty & Ayu, 2011) ;

- a. tidak ada seorang pun yang diijinkan untuk berpindah tempat tinggal
- b. Semua kasus kriminal harus diadili dan dihukum.
- c. Semua pernikahan yang melibatkan daimyou harus seijin Tokugawa.
- d. tidak diperbolehkan sama sekali membangun kastil baru, dan bahkan untuk memperbaiki kastil yang sudah ada harus seizin Tokugawa.
- e. Apabila menemukan sebuah upaya konspirasi dari lapisan masyarakat manapun harus segera dilaporkan.
- f. Para daimyou harus mengikuti urutan kepangkatan yang telah ditentukan.
- g. Para daimyou harus mengikuti aturan seragam yang telah ditentukan.
- h. Memeriksa setiap perjalanan, dengan badan administrative khusus dimana setiap penduduk wajib untuk memperlihatkan kartu izin perjalanan kepada pihak setempat.



- i. Melarang masyarakat untuk pergi keluar pada larut malam tanpa tujuan yang jelas, khususnya di tempat yang bukan wilayah tempat tinggalnya.
- j. Membentuk polisi rahasia untuk melaporkan atas pergerakan manapun yang mencurigakan.

3. Sistem Pelapisan Sosial

Masyarakat dibagi menjadi empat kelas sosial, yang disebut dengan *Shinokosho* yang merupakan singkatan dari *shi* artinya *bushi* atau militer, *noo* artinya *noomin* atau petani, *Koo* artinya *koosakunin* atau tukang, dan *sho* artinya *shonin* atau pedagang. Dan dibawah kelas ini disebut dengan eta dan hinin yang dianggap sebagai kelas terendah yang mungkin dapat disamakan dengan kaum budak.

Tujuan utama ditetapkannya sistem pelapisan sosial yang ketat ini ialah untuk melaksanakan pengawasan feodal militer secara ketat. Seseorang tidak diperbolehkan menukar status kelasnya, sehingga sistem pelapisan sosial ini berlaku secara turun temurun. Seseorang juga dilarang melakukan perkawinan campuran, sehingga diskriminasi sosial sangat tajam di masyarakat Tokugawa ini.

4. Ideologi Masyarakat Tokugawa

Pada masa Tokugawa Bentuk feodalisme yang berhasil diterapkan pemerintah Jepang ini dibuktikan dengan dibuatnya “falsafah nasional” bangsa Jepang yang digunakan sebagai pegangan hidup yang dalam bahasa Jepangnya disebut “*kokutai no honggi*” (prinsip dasar negara), dimana prinsip tersebut menempatkan Kaisar sebagai penguasa negara yang merupakan keturunan langsung dari Amaterasu (Dewa).



5. Pelarangan Agama Kristen

Pada tahun 1603 terjadi perubahan politik di Jepang, di mana jabatan shogun kembali digunakan. Okugawa Ieyasu sangat menentang kekristenan, karena rasa takut dan curiga terhadap pengaruh kekristenan yang dapat mengancam keberlangsungan dinastinya dan sistem tatanan budaya yang sudah disusun selama ratusan tahun, serta dapat membawa kekuasaan bangsa Eropa ke Jepang. Ieyasu hanya menolerir para umat Kristen karena proses perdagangan dengan Portugis dan Spanyol sangatlah menguntungkan. Pada tahun 1614, Ieyasu memerintahkan pengusiran Pendeta-pendeta Kristen (G. B. Putri, 2023).

D. Rangkuman

Proses penyatuan Jepang pada akhir Periode Sengoku merupakan hasil dari kepemimpinan berlapis yang dijalankan oleh Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Ketiga tokoh ini menunjukkan kesinambungan strategi politik dan militer yang membentuk transformasi Jepang dari kondisi fragmentasi feodal menuju negara yang terpusat dan stabil. Dinamika kekuasaan yang mereka bangun tidak hanya berdampak pada penyatuan wilayah, tetapi juga membentuk ulang struktur sosial, ekonomi, dan ideologi politik Jepang.

Oda Nobunaga tampil sebagai aktor pembongkar tatanan lama dengan pendekatan militer inovatif dan kebijakan ekonomi yang membuka ruang modernisasi. Penggunaan senjata api, penghapusan monopoli perdagangan, serta penaklukan institusi keagamaan yang berperan sebagai kekuatan politik menandai pergeseran dari feodalisme tradisional menuju sistem kekuasaan yang lebih rasional dan terpusat.



Kepemimpinannya, meskipun keras dan represif, menjadi fondasi awal bagi runtuhnya dominasi daimyo yang saling bersaing.

Toyotomi Hideyoshi melanjutkan proses tersebut melalui konsolidasi politik dan reformasi sosial yang lebih sistematis. Keberhasilannya menyatukan Jepang secara de facto disertai dengan kebijakan pengendalian sosial, seperti penyitaan senjata, sensus nasional, pengukuran tanah, dan penguatan administrasi negara. Langkah-langkah ini memperlihatkan upaya menciptakan stabilitas internal dan memperkuat otoritas pusat, sekaligus menandai lahirnya tatanan sosial baru yang lebih terstruktur.

Tokugawa Ieyasu kemudian mengukuhkan hasil penyatuan tersebut melalui pelembagaan kekuasaan dalam bentuk Keshogunan Tokugawa. Penerapan sistem feodal terpusat, pengawasan ketat terhadap daimyo, stratifikasi sosial yang rigid, serta kebijakan isolasi (*sakoku*) menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Kebijakan ini menempatkan loyalitas dan ketertiban sosial sebagai pilar utama pemerintahan, sekaligus membatasi intervensi asing yang berpotensi mengganggu tatanan internal.

Secara keseluruhan, Triumvirat Jepang mencerminkan tiga fase krusial dalam pembentukan negara: destruksi tatanan lama, konsolidasi kekuasaan, dan stabilisasi institusional. Pola kepemimpinan yang berurutan ini menjelaskan bagaimana Jepang mampu keluar dari konflik berkepanjangan dan membangun fondasi negara yang bertahan hingga memasuki era modern. Pemahaman terhadap dinamika Triumvirat ini menjadi kunci dalam membaca sejarah politik Jepang serta karakter negara dan masyarakatnya pada masa selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, R. P. (2020). ARTI PENTING STRATEGI PERANG TOYOTOMI HIDEYOSHI DALAM MEMPERSATUKAN JEPANG TAHUN 1554-1598 Oleh: *Karmawibangga: Historical Studies Journal*, 02, 94–102.
- Asep, S. (2025). Oda Nobunaga, Samurai Berjuluk Raja Iblis dengan Tindakan Brutal Religius. In *National Geographic Indonesia*. Diakses tanggal 2 November 2025, dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/134308077/oda-nobunaga-samurai-berjuluk-raja-iblis-dengan-tindakan-brutal-religius?page=all>
- Cartwright, M. (2019). Oda Nobunaga. In *World History Encyclopedia*. Diakses tanggal 2 November 2025, dari https://www.worldhistory.org/Oda_Nobunaga/
- G. B. Putri, & Y. (2023). PENGARUH KEBIJAKAN SAKOKU PADA AGAMA KRISTEN DI JEPANG. *JPBJ*, 9(3), 183–190.
- Sugiarti, D.P,& Apriliani, K. (2017). ANALISIS STRATEGI PERANG TOYOTOMI HIDEYOSHI UNTUK MEMPERSATUKAN JEPANG DALAM NOVEL THE SWORDLESS SAMURAI KARYA KITAMI MASAO. *JURNAL LINGUISTIK DAN SASTRA*, 9(2).
- Widarahesty, Y., & Ayu, R. (2011). *Pengaruh Politik Isolasi (Sakoku) Jepang Terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang : Studi Tentang Politik Jepang dari Zaman Edo (Feodal) Sampai Perang Dunia II*. 1, 46–62.



BAB 4

RESTORASI MEIJI 1868-1912

*Denddy Rayhan Garland Susanto, Fikri Ahmad Maulana, Gina Tsania
Salsabila, Shinta Alda Yunita*

Restorasi meiji merupakan peristiwa penting di dalam sejarah Jepang yang dimulai pada 3 Januari 1868. Awal dari restorasi meiji dimulai dengan adanya pemberontakan beberapa samurai yang menentang pemerintahan tokugawa, yang berlangsung selama lebih dari 250 tahun, di mana pemerintahannya yang bersifat diktatorial dan membuat kebijakan isolasi (sakoku) sehingga Jepang relatif terisolasi dari pengaruh asing. (Hadi, 2025) menjelaskan bahwa Pembaruan Meiji terjadi karena Pertama: otoritas kedaulatan politik Tokugawa atas han (provinsi) sudah melemah sebagai akibat buah perjuangan kalangan elit-elit politik Jepang sendiri yang sudah mulai jenuh dengan sistem politik dan ekonomi yang dijalankan secara desentralisasi dan tertutup berdasarkan han saja; Kedua, adanya tekanan Barat terutama negara-negara industri di Barat agar Jepang membuka pelabuhan lautnya bagi kapal-kapal dan pedagang asing, indikasi melemahnya otoritas Jepang terhadap tekanan Barat dimulai sejak tahun 1853 dengan tibanya kapal Admiral Perry dipimpin Komodor Matthew C. Perry dari AS di pelabuhan Jepang; Ketiga, rezim Tokugawa yang struktur pemerintahannya tidak terpusat secara nasional melainkan terkonsentrasi di han saja, membuat kalangan bangsawan yang terkonsentrasi di han merasa kurang memiliki akses terhadap pemerintahan yang ada, lalu mereka menggunakan kekuatan militer yang dapat mereka



pengaruhi di setiap han secara setahap demi setahap melakukan sejumlah perubahan administrasi dan sosial secara fundamental.

Pada 1868 sekelompok samurai dan ningrat militer revolusioner berhasil mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan rezim tokugawa. Setelah mengambil kekuasaan mereka berusaha untuk menghancurkan struktur lama dan menggantinya dengan tatanan politik dan sosial baru yang terinspirasi dari peradaban Barat. Setelah kematian kaisar komei, Mutsuhito yang baru berusia 15 tahun diangkat menjadi kaisar pada 1867.

Sebelum diangkat menjadi kaisar Mutsuhito diwajibkan untuk menjalankan regency di bawah bimbingan penasihatnya yang berpengaruh. Tiga bulan setelah naik tahta kaisar Mutsuhito atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaisar meiji mengeluarkan piagam sumpah lima prinsip pada bulan April 1868. Dokumen ini mencakup visi untuk mengembangkan Jepang ke arah modernisasi dan mengedepankan pemerintahan yang lebih terbuka serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan publik. Di bawah kekuasaan kaisar meiji, Jepang bertransformasi dari pemerintahan feodal yang dikuasai oleh Shogun tokugawa menjadi sistem monarki konstitusional. Meiji juga mendirikan majelis nasional sebagai lambang legislatif meskipun kekuasaan ditanganlah kaisar dan kelompok elit dikuasai oleh beberapa tokoh terkemuka. Meiji juga mengubah beberapa tatanan seperti ekonomi di mana magic mempelopori transisi dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Di bidang pendidikan pula dia membentuk berbagai lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga universitas sehingga memungkinkan



rakyat mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memajukan negara.

A. Proses dan Peristiwa Restorasi Meiji

Pada tahun 1868, suatu kelompok di dalam pemerintahan kaum ningrat militer Jepang mengambil alih kekuasaan, kemudian mulai melancarkan program secara revolusioner yang dikenal dengan Restorasi Meiji (Meiji Ishin). Orang-orang revolusioner ini menolak usul-usul tradisional untuk mengatasi krisis politik yang ditimbulkan oleh Commodore Perry pada tahun 1853. Mereka kemudian menumbangkan rezim Tokugawa, meniadakan hak-hak istimewa golongan mereka sendiri, dan tanpa berpikir panjang mengorbankan unsur-unsur tradisi Jepang.

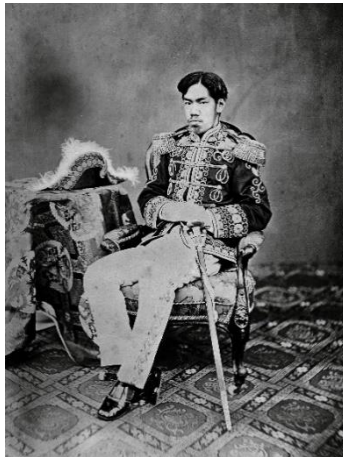
Kelompok ningrat militer Jepang itu menyambut tantangan kekuatan Barat dengan menghancurkan struktur lama dan menegakkan tatanan politik dan sosial baru yang diilhami oleh peradaban Barat, yang notabene adalah lawan mereka. Selama masa kepemimpinan aktif mereka, yaitu tahun 1868 sampai pergantian abad, Jepang telah melampaui masa peralihan dari negeri yang sejak dahulu kala agraris menjadi suatu negeri yang mendekati ekonomi industri.

Pemerintahan Shogun yang terakhir mengundurkan diri dari pemerintahan karena tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jepang. Pembukaan Jepang dari isolasi menyebabkan pemerintahan Bakufu di bawah ke-Shogunan Tokugawa tidak becus menghindari pengaruh asing. Akhirnya, pemerintahan dikembalikan pada kaisar Tenno.



Meiji Tenno (dengan nama kecil Mutsuhito) lahir pada 3 November 1852 di Kyoto dan meninggal pada 30 Juli 1912 di Tokyo. Ia adalah kaisar Jepang yang memerintah dari tahun 1867 sampai 1912. Pada masa pemerintahannya, Jepang secara mengejutkan berubah dari negara feodal menjadi salah satu kekuatan yang modern. Meiji adalah putera kedua dari kaisar Komei. Ia dinyatakan sebagai kaisar pada tahun 1860, dan setelah kematian ayahnya pada tahun 1867, ia resmi naik takhta.

Kata Meiji berarti kekuasaan pencerahan. Pemerintah waktu itu bertujuan menggabungkan "kemajuan Barat" dengan nilai-nilai "Timur" tradisional. Kaisar Mutsuhito diberikan kekuasaan saat usianya baru mencapai 15 tahun. Ia dibantu oleh para penasihatnya dari klan Satsuma dan klan Chosu. Selain itu, ada juga klan Tosa (di Shikoku) dan Hizen (di Kyusu) yang turut menasihati kaisar. Para bangsawan seperti Iwakura Tomomi juga ikut memberikan nasihat.



Gambar 11. Kaisar Meiji

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kaisar_Meiji



Kerjasama Kaisar dan penasihat itu telah berhasil melakukan langkah besar terhadap pembangunan negeri Jepang dengan perubahan secara modern. Para pemimpin utama pembantu kaisar pada waktu itu di antaranya: Ito Hirobumi, Matsukata Masayoshi, Kido Takayoshi, Itgaki Taisuke, Yamagata Aritomo, Mori Arinori, Okubo Toshimichi, dan Yamaguchi Naoyoshi. Mereka menyadari bahwa untuk mempertahankan diri dan untuk mengimbangi kemajuan yang terjadi di negeri-negeri Barat adalah dengan jalan menguasai ilmu dan teknologi mereka, baik itu dalam bidang militer maupun di bidang ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan.

Mutsuhito dinobatkan jadi kaisar tahun 1868 dengan Meiji sebagai gelar pemerintahannya. Suksesi Meiji naik ke pemerintahan bertepatan dengan berakhirnya Keshoghunan Tokugawa dan pemulihan kaisar dari otoritas eksekutif tertinggi negara itu. Tidak seperti Komei, ia mendukung konsensus populer yang berkembang tentang perlunya modernisasi Jepang di sepanjang garis Barat. Pada tahun 1868 Meiji mengambil "Piagam Sumpah Lima Prinsip" yang diluncurkan Jepang dalam program meniru negara Barat.

Meskipun secara resmi kekuasaan negara berada di tangan kaisar, kekuatan politik hanya bergeser dari Keshogunan Tokugawa ke sebuah oligarki. Sebagian besar kekuasaan berada di tangan pemimpin elite dari Provinsi Satsuma (Okubo Toshimichi, Saigo Takamori) dan Provinsi Choshu (Ito Hirobumi, Kido Takayoshi, dan Yamagata Aritomo). Mereka mempertahankan praktik-praktik kekuasaan kaisar yang lebih tradisional, dan menempatkan Kaisar Jepang sebagai satu-satunya otoritas spiritual negeri dan para menteri yang memerintah atas nama kaisar.



Para penasihat memiliki keinginan tulus untuk memajukan Jepang menjadi lebih baik dan menghadapi bangsa asing. Mereka memiliki keinginan untuk mencapai kesuksesan pribadi karena rezim sebelumnya tidak memberikan mereka tempat untuk berkembang. Mereka membuat terobosan baru untuk diri mereka sendiri dan juga bangsa Jepang. Tujuan paling utama dari penting adalah meredam pemberontakan.

Pemberontakan setelah naiknya Kaisar Meiji terjadi di daerah Edo, yang dengan segera dapat diatasi oleh pemerintah dengan menangkap 2.000 tentara pemberontak pada bulan Juli. Tokoh utama pemberontak adalah seorang loyalis Shogun bernama Enomoto Takeaki (1836-1908) yang melarikan diri dari Edo dengan armada kapal perang. Takeaki pergi menuju ke Hokkaido dan mendeklarasikan republik Jepang yang didukung Amerika Serikat. Takeaki dapat dikalahkan pada bulan Juni setahun kemudian. Perlawanan dari kaum pemberontak masih terjadi dengan skala yang lebih kecil tapi dengan sigap pemerintahan Meiji dapat meredamnya.

Kaisar Meiji memberikan kepastian tentang bagaimana cara Jepang untuk menghadapi pihak asing. Sekitar 3 bulan setelah mendapat pucuk kekuasaan, kaisar Meiji dan para penasihatnya mengeluarkan Sumpah Piagam yang terdiri dari 5 pasal:

- a. Musyawarah atau diskusi tentang semua hal.
- b. Semua golongan masyarakat ikut serta dalam administrasi negara.
- c. Kebebasan untuk semua orang mendapatkan pekerjaan masing-masing.
- d. Meninggalkan kebiasaan tidak baik di masa lalu.



- e. Mencari pengetahuan ke seluruh dunia untuk memperkuat negara.

Isi dari sumpah piagam, terutama poin ke-5, membahas tentang cara menghadapi bangsa asing dengan belajar dari bangsa asing tersebut. Slogan tentang anti-asing seperti *Sonno Jo* (hormati Kaisar, usir orang barbar) segera diganti oleh slogan yang lebih pragmatis dan konstruktif seperti *Wakon Yosai* (semangat Jepang, pembelajaran Barat).

B. Kebijakan dan Reformasi Utama Kaisar Meiji

Kaisar Meiji melakukan kebijakan-kebijakan penting, di antaranya:

- a. Memprakarsai penghapusan sistem tanah feodal (1871).
- b. Menciptakan sistem sekolah baru (1872).
- c. Penerapan sistem kabinet pemerintahan (1885).
- d. Pengesahan konstitusi Meiji (1889).
- e. Pembukaan Diet (Parlemen) (1890).
- f. Memainkan peran aktif dalam penuntutan Perang China-Jepang (1894-95) dan Perang Rusia-Jepang (1904-05).
- g. Mengeluarkan dekret yang menyatakan aneksasi Korea ke Jepang pada tahun 1910.



Kaisar Meiji melambungkan superimposisi ide dan inovasi Barat ke dalam basis budaya Jepang.

1. Dalam Bidang Pemerintahan

Pemerintahan Meiji menjanjikan rakyat Jepang untuk mengubah politik pemerintahan dengan mendirikan pemerintahan konstitusional. Konstitusi Jepang disahkan pada 1889 dengan sistem liberal dan kebebasan berpendapat. Pada akhir 1890 didirikan Majelis Nasional dengan sebutan *becameral Diet*. Konstitusi nasional ini membuat landasan negara Jepang agar menjadi kuat dan kaya dan setara dengan negara Barat.

Sejak tahun 1882, beberapa orang Jepang mulai survei UUD negara Barat dan akhirnya memilih konstitusi negara Jerman sebagai contoh UUD Jepang yang baru. UUD Jepang yang baru bersifat monarkis dan kaisar memegang kekuasaan tertinggi (kaisar dianggap sebagai dewa tertinggi). Kaisar memegang penuh Konstitusi, ia bisa mengendalikan militer, berdamai dengan negara lain, menyatakan perang, dan membubarkan parlemen mejelis rendah.

2. Dalam Bidang Pendidikan

Pemerintah meiji menerapkan sistem konstitusional dan pendidikan wajib sebagai fondasi pembentukan Negara modern (Azizah et al., 2025). Dimana pemerintahan meiji menerapkan pendidikan wajib dan bebas bagi seluruh rakyat Jepang selama empat tahun. Dibukanya berbagai macam dan tingkat sekolah hingga universitas. Pemerintah mengadakan penerjemahan berbagai buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Jepang. Faktor pendidikan ini berpengaruh besar kepada pertumbuhan Jepang menjadi negara modern dan kuat dalam bidang ekonomi, karena menciptakan tenaga manusia



yang cakap. Pada tahun 1886, pemerintah mewajibkan belajar di sekolah dasar selama tiga atau empat tahun. Pada tahun 1900, pendidikan wajib diberikan cuma-cuma, dan pada tahun 1908 menjadi enam tahun. Setelah Perang Dunia II, masa wajib belajar menjadi sembilan tahun.

3. Kebijakan Berorientasi Kekuatan Sendiri

Kebijakan ketiga adalah sikap Jepang untuk lebih berorientasi kepada kekuatan sendiri atau berdikari dari pada berdasarkan pada bantuan luar negeri. Para pemimpin Jepang menyadari bahwa kekuatan keuangan Jepang pada Restorasi Meiji sangat terbatas. Kekuatan yang terbatas dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun industri. Ekspor sutra menjadi sumber utama pada tahap awal untuk mengumpulkan keuangan. Para pemuda Jepang diizinkan untuk melakukan studi ke Eropa, belajar dari Inggris, Prancis, dan Jerman.

4. Dalam Bidang Militer (Wajib Militer)

Kebijakan keempat adalah diadakannya wajib militer bagi seluruh rakyat Jepang yang sudah diatur melalui undang-undang pada tahun 1872. Setelah penghapusan golongan samurai, fungsi pertahanan bukan lagi menjadi kewajiban bagi satu golongan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat.

Wajib militer diberlakukan untuk semua laki-laki berumur 20 tahun ke atas Jepang bekerja sama dengan negara Inggris dalam mengembangkan angkatan laut. Jepang mengirim utusan bernama Yamagata Aritomo ke Prancis dan Prusia (Jerman) untuk mempelajari organisasi militer modern model Barat. Sekembalinya di Jepang, Yamagata Aritomo membentuk tentara yang terdiri atas para samurai dan rakyat umum. Pada tahun 1878, Yamagata mengorganisasikan staf angkatan



perang Jepang menurut model Prusia (Jerman). Pada tahun 1883, sebuah akademi militer dibangun, sehingga para perwira muda Jepang tidak perlu dikirim untuk belajar ke luar negeri.

5. Perubahan Sistem Perpajakan

Kebijakan yang kelima adalah perubahan sistem perpajakan. Sumber utama dari perpajakan saat itu adalah dari sektor tanah. Pada masa Tokugawa, pajak dibayar dengan hasil tanah (beras), yang membuat pemasukan pajak tidak stabil. Pada masa pemerintahan Meiji, pajak ditetapkan ketetapan pajak untuk masa 6 tahun (1873-1879) sebesar 3 persen dari nilai tanah. Pajak harus dibayar dengan uang tunai.

6. Dalam Bidang Ekonomi

Sebagian besar masyarakat selama masa feodal Jepang hidup dengan mengandalkan usaha keluarga yang dijalankan secara turun temurun. Setelah Restorasi Meiji, ekonomi Jepang mengalami perkembangan yang pesat. Sebelum Restorasi Meiji, Jepang adalah negara dengan masyarakat agrikultur. Namun pasca Restorasi Meiji, Jepang menjadi sangat unggul dalam bidang manufaktur.

7. Dalam Bidang Budaya

Walaupun Zaman Meiji merupakan titik balik dalam perkembangan politik, ekonomi, dan pendidikan Jepang, namun dalam bidang kebudayaan hampir tidak memperlihatkan perubahan-perubahan besar. Pakaian kimono, upacara minum teh, seni merangkai bunga, dan pembuatan taman pemandangan alam, yang berpangkal pada kebiasaan dan adat istiadat Jepang, tetap merupakan sendi-sendi kebudayaan Jepang, hal tersebut sejalan dengan (Anita & Lado, 2024) yang menuturkan bahwa meskipun mengalami



modernisasi pesat, Jepang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional seperti Bushido dan adat istiadat lokal.

Restorasi Meiji memiliki dampak pada perubahan di berbagai area kehidupan masyarakat Jepang. Restorasi Meiji berarti pemulihan, yang mencakup pembangunan dan pembaharuan. Kemajuan yang Jepang alami setelah Restorasi Meiji tidak hanya membuat rakyatnya sejahtera, tetapi juga menjadikan Jepang bangsa yang maju dan kompetitif dengan negara Barat.

C. Dampak Restorasi Meiji Terhadap Jepang Modern

1. Bidang Pemerintahan

Setelah pemerintahan dipegang oleh Kaisar Tenno (Kaisar Meiji), ia menghapuskan sistem feodal yang sebelumnya berlaku. Setiap wilayah daimyo diangkat seorang wakil pemerintah pusat. Para daimyo juga dijadikan pegawai negeri dan ditempatkan di ibu kota, yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengawasan wilayah.

Kaisar Tenno mengesahkan Undang-Undang Dasar negeri Jepang pada 11 Februari 1890. Tenno juga menyusun dewan perwakilan rakyat yang terdiri atas dua bagian, yaitu:

- a. Majelis Tinggi (anggotanya ditunjuk oleh Tenno seumur hidup).
- b. Majelis Terendah (anggotanya dipilih oleh orang-orang yang membayar pajak tanah).



2. Bidang Militer

Kesatuan tentara Jepang dibentuk pada tahun 1873. Angkatan perang dibangun secara modern dengan peralatan yang dibeli dari negara Eropa. Jepang juga mempelajari pembuatan alat perang dan memproduksinya sendiri. Angkatan Darat Jepang dipegang oleh keluarga Chosyu dan mencontoh angkatan darat negara Jerman. Angkatan Laut Jepang dipegang oleh Keluarga Satyusuma dan mencontoh angkatan laut negara Inggris, pada masa itu modernisasi militer dan reformasi perpajakan menjadi instrument utama Jepang dalam memperkuat Negara dan mendukung industrialisasi (Rustamana et al., 2023).

Warga negara Jepang yang sudah berusia 20 tahun diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Modernisasi militer ini menumbuhkan kembali semangat bushido dalam kemiliteran Jepang, di mana mati memperjuangkan Tenno adalah mati dalam sebuah kesempurnaan dan termulia. Pemerintah Jepang juga membentuk departemen pertahanan yang disebut gunbatsu dalam bahasa Jepang. Jepang berhasil memiliki angkatan pertahanan yang kuat karena setengah dari anggaran belanja negara digunakan untuk kebutuhan militer.

Akibat dari modernisasi militer ini, golongan samurai secara tidak langsung dihapuskan. Hal ini kemudian menyebabkan adanya Pemberontakan Satsuma (Seinan Senso, Perang Barat Daya). Pemberontakan ini berlangsung selama 11 bulan pada awal era pemerintahan Meiji dan dimulai pada tahun 1877. Dipimpin oleh Saigo Takamori terhadap tentara kekaisaran Meiji, pemberontakan ini terjadi di Kyushu, tepatnya di prefektur Kumamoto, Miyazaki, Oita, dan Kagoshima. Penghapusan pedang (haito-Rei) yang melarang para samurai untuk membawa katana merupakan salah satu faktor munculnya pemberontakan ini. Perang ini berlangsung selama



6 minggu, dan pada pertempuran terakhir, saat Saigo Takamori mengalami luka berat dan akan ditangkap, Saigo melakukan Seppuku pada 24 September 1877. Sepuluh tahun kemudian, Kekaisaran Jepang meminta maaf dan memberikan gelar Samurai Terakhir kepada Saigo Takamori.

3. Bidang Pendidikan

Departemen pengajaran dibentuk oleh Jepang pada tahun 1871 dengan mengubah pengajaran tradisional ke pengajaran modern. Dalam sistem ini, diberlakukan pendidikan wajib bagi anak-anak usia 6 tahun, dan hal ini berlaku pada semua penduduk. Jepang juga mendirikan sekolah rendah, sekolah menengah, dan perguruan tinggi.

Jepang juga mengirim pelajar ke Eropa untuk menyempurnakan ilmu yang dipelajari di dalam negeri. Mereka yang dikirim ke Eropa ditugaskan untuk belajar ilmu teknik, kedokteran, ekonomi, dan lain sebagainya. Setelah kembali ke Jepang, mereka dituntut untuk aktif dalam pembangunan dan modernisasi negara. Hasilnya, dalam 50 tahun Jepang sudah menjadi negara yang modern.

4. Bidang Industri

Jepang fokus pada industri teh dan sutra karena kedua komoditas ini laku di pasaran luar negeri. Tujuan pemfokusan ini adalah untuk mendapatkan devisa sebesar-besarnya, yang kemudian digunakan untuk memodernisasi perusahaan dan pengembangan industri.

Jepang juga membeli mesin produksi dari Eropa dan mendatangkan ahli teknik dari luar negeri untuk mengajari orang-orang Jepang. Setelah orang-orang Jepang mampu mengoperasikan mesin tersebut, selanjutnya para ahli dari luar negeri tersebut dipulangkan kembali ke negaranya.



D. Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Cina dan Korea

Restorasi meiji membentuk fondasi jepang modern sekaligus mengubah dinamika hubungan internasional di kawasan asia timur (Azizah et al., 2025). Pengaruh restorasi Meiji juga berdampak terhadap Cina dan Korea. Karena letaknya yang berada di Asia Timur, keberhasilan modernisasi jepang mendorong ekspansi imperialisme ke cina dan korea yang berdampak pada perubahan politik dan sosial dikawasan asia timur (Rustamana et al., 2023). Alasan Jepang melakukan imperialisme dan invasi ke Cina dan Korea adalah untuk pembangunan sektor industri dalam upaya modernisasi Jepang.

1. Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Cina (Tiongkok)

Upaya Restorasi Meiji untuk pengembangan industrialisasi di Jepang meningkatkan kekuatan ekonomi Jepang. Restorasi Meiji membuat sistem militer dan juga teknologi Jepang menjadi unggul, hal ini membuat Cina ketertinggalan. Pada tahun 1894-1895 terjadi Perang Cina-Jepang Pertama. Perang ini terjadi antara Dinasti Qing (Cina) dan Meiji (Jepang) dalam memperebutkan Korea. Perang ini berakhir dengan kemenangan Jepang atas kekalahan Dinasti Qing dan juga penandatanganan Perjanjian Shimonoseki tahun 1895, yang berisi:

- a. Ganti rugi 30 juta tael kepada Jepang.
- b. Cina mengakui kemerdekaan Korea.
- c. Cina menyerahkan Taiwan, Pescadores, dan semenanjung Liaodong di Manchuria kepada Jepang.
- d. Memberikan hak istimewa kepada Jepang untuk berdagang di wilayah Tiongkok.



Pengaruh Restorasi Meiji terhadap Cina dapat juga dilihat dalam aspek budaya, sosial, ide-ide modern Jepang, konsep negara bangsa, sistem pendidikan, dan model militer, yang memberikan dampak pada perkembangan pemikiran di Cina.

2. Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Korea

Setelah Jepang menang atas Perang Tiongkok I dan berhasil menguasai berbagai wilayah di Cina, berarti Jepang juga masuk ke dalam sejarah Korea. Sebelumnya, Korea merupakan bekas jajahan Cina terlebih dahulu. Berakhirnya kekuasaan Cina atas Korea sejak 27 Februari 1876. Pada tahun 1883, Amerika meresmikan kemerdekaan Korea.

Pada tahun 1910, Jepang secara resmi menguasai negara Korea dan menamai negaranya sebagai "Chosen". Kependudukan Jepang di Korea berlangsung hingga tahun 1945, tepatnya saat Jepang kalah di Perang Dunia II. Pada masa kependudukan tersebut, Korea Utara dikuasai oleh Rusia dan Korea Selatan di bawah kependudukan Amerika Serikat. Pada masa kependudukan Jepang atas Korea Selatan, masyarakat Korea berusaha untuk mempertahankan budaya mereka karena pada saat itu Jepang melarang penggunaan bahasa dan sejarah Korea. Terdapat juga perilaku Jepang untuk memaksa para petani Korea untuk berhenti bercocok tanam, karena harus memenuhi kebutuhan Jepang terlebih dahulu. Jepang juga mengambil alih kekuasaan atas militer dan pemerintahan Korea.

Invasi Jepang atas Korea terjadi pada saat Perang Dunia I. Terdapat upaya masyarakat Korea untuk mendukung perdamaian dunia saat Perang Dunia I berlangsung dan mengklaim hak untuk mengatur negara mereka sendiri sebagai bangsa yang berdaulat, tetapi pemerintahan Jepang



menolak. Dari pemberontakan tersebut, banyak masyarakat Korea yang ditangkap dan dipenjarakan hingga meninggal dunia pada tahun 1920-an.

Pemerintah Jepang menanggapi kritik terhadap pemerintahannya dari Korea, karena menurut Korea, Jepang memiliki kebijakan yang restriktif atau membatasi. Melalui kritikan tersebut, Jepang mengizinkan Korea untuk menerbitkan buku dan majalah dalam bahasa Korea. Jepang berpendapat bahwa mereka memodernisasi Korea dan menyediakan peluang untuk berdagangan.

Namun, menjelang tahun 1930, Jepang menjadi pemerintahan yang berada di bawah kendali militer. Jepang menganggap bahwa Korea adalah sebagian dari kekaisaran Jepang sehingga keseluruhan Korea harus sama dengan Jepang. Jepang juga mempekerjakan secara paksa orang-orang Korea saat Perang Dunia II dan dikenal sebagai budak dalam masa penjajahan Jepang. Atas Korea juga terdapat isu mengenai kekalahan Jepang pada tahun 1945. Korea memperoleh kembali kemerdekaannya, yang menjadi kebebasan bagi Korea, tetapi dengan kemenangan sejarah yang menyakitkan dan menjadi penyebab perselisihan Jepang dan Korea hingga saat ini.

E. Rangkuman

Restorasi Meiji (1868) merupakan peristiwa penting dalam sejarah Jepang yang menandai berakhirnya sistem feodal Keshogunan Tokugawa dan pemulihan kekuasaan politik di tangan Kaisar Meiji (Mutsuhito). Perubahan ini dipicu oleh melemahnya otoritas Tokugawa, tekanan negara-negara Barat sejak kedatangan Komodor Matthew C. Perry pada 1853, serta ketidakpuasan elit politik dan militer terhadap sistem han

yang tertutup dan terdesentralisasi. Melalui Piagam Sumpah Lima Prinsip tahun 1868, Jepang menyatakan tekad untuk membuka diri terhadap dunia luar, mengembangkan pemerintahan yang lebih terbuka, serta mencari ilmu pengetahuan dari Barat. Di bawah kepemimpinan Kaisar Meiji dan para penasihat oligarki dari klan Satsuma, Choshu, Tosa, dan Hizen, Jepang mulai melakukan transformasi menyeluruh menuju negara modern.

Reformasi Meiji meliputi penghapusan sistem feodal, pembentukan pemerintahan konstitusional, modernisasi militer melalui wajib militer, penerapan pendidikan wajib, reformasi perpajakan, serta percepatan industrialisasi. Kebijakan-kebijakan ini berhasil mengubah Jepang dari negara agraris menjadi negara industri dan kekuatan militer modern dalam waktu singkat. Keberhasilan modernisasi tersebut mendorong Jepang melakukan ekspansi ke Cina dan Korea, yang ditandai dengan kemenangan dalam Perang Cina-Jepang (1894-1895) dan aneksasi Korea pada 1910. Dengan demikian, Restorasi Meiji tidak hanya membentuk fondasi Jepang modern, tetapi juga membawa dampak besar terhadap dinamika politik, ekonomi, dan hubungan internasional di kawasan Asia Timur.



DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A., Putri, W. A., Fauziah, R., Rahmawati, S., & Fatona, F. (2025). Restorasi Meiji, Modernisasi Jepang. *EDUKATIF: JURNAL KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN*, 6(2), <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp>
- Anita, & Lado, S. H. J. T. (2024). Kajian Historis Jepang Masa Restorasi Meiji. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*,8(1), 828–834. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3745>
- Hadi, K. (2025). Restorasi Meiji dan Kolaborasi Negara-Masyarakat Dalam Kekuatan Ekonomi Politik Jepang. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 512-526.
- Rustamana, A., Alyani, L. I., Nurcahyo, G., Ardiansyah, F., & Pratiwi, A. (2023). MASA RESTORASI MEIJI DAMPAKNYA PADA PERKEMBANGAN JEPANG MODERN DAN PENGARUH RESTORASI MEIJI TERHADAP CHINA DAN KOREA. *CENDIKIA PENDIDIKAN*,1(11),101–112.



BAB 5

KONFLIK SEDARATAN DI ASIA TIMUR TENTANG CHINA, KOREA DAN JEPANG DALAM PERDEBATAN INTERNASIONAL (1894-1954)

Melin Melindawati, Dan Nur Abdullah, Adi Ramdani

Kawasan Asia Timur merupakan salah satu wilayah dengan dinamika permasalahan yang paling kompleks di dunia. Hubungan antar negara di kawasan ini, khususnya antara Cina, Jepang, dan Korea, secara historis terbentuk atas pola permusuhan (enmity) dan kompetisi yang tinggi. Hal ini menimbulkan tingkat kecurigaan yang tinggi di antara satu sama lain. Kebangkitan nasionalisme di Asia Timur pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadi fondasi dari ketegangan ini. Namun, nasionalisme di ketiga negara terbentuk dengan cara yang berbeda. Nasionalisme Jepang terbangun dari gabungan unsur etnisitas dan loyalitas politik untuk mencegah kolonialisme Barat. Sebaliknya, nasionalisme di Cina dan Korea cenderung didasarkan pada loyalitas politik untuk melawan penjajahan, baik dari Barat maupun dari Jepang sendiri. Perbedaan fundamental dalam memori sejarah dan pembentukan identitas kebangsaan ini terus memengaruhi hubungan regional hingga saat ini.

A. Dinamika Politik dan Sejarah Kawasan

1. Masa Imperialisme Dan Kolonialisme Di Asia Timur

Imperialisme dan kolonialisme di Asia Timur merupakan bagian penting dari dinamika sejarah global abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Kawasan ini, yang meliputi Tiongkok, Korea, Jepang, dan Asia Timur Laut lainnya, menjadi arena persaingan kekuatan Barat dan Jepang dalam memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan budaya. Dalam literatur akademik, imperialisme dipahami sebagai suatu sistem dominasi di mana negara kuat menanamkan kontrol struktural terhadap wilayah lain, baik melalui penaklukan langsung maupun melalui mekanisme ekonomi dan politik tidak langsung.

Imperialisme di Asia Timur tidak selalu berbentuk kolonialisme formal. Sebagaimana dijelaskan oleh John Darwin (2009), imperialisme modern sering kali bekerja melalui “informal empire”, yaitu penguasaan tanpa aneksasi wilayah, tetapi melalui tekanan diplomatik, perjanjian tidak setara, dan penetrasi ekonomi. Kolonialisme, sebaliknya, merujuk pada penguasaan langsung suatu wilayah oleh kekuatan asing, yang diikuti dengan pembentukan administrasi kolonial dan eksploitasi sumber daya.

Dalam konteks Asia Timur, bentuk-bentuk imperialisme Barat berkembang seiring dengan Revolusi Industri, ketika negara-negara Eropa dan Amerika Serikat membutuhkan pasar, bahan mentah, serta wilayah strategis. Jepang kemudian muncul sebagai kekuatan imperialisme baru yang mengadopsi pola Barat setelah Restorasi Meiji.



2. Perang Tiongkok-Jepang (1894-1895)

Latar Belakang dan Perencanaan ini berakar dari masalah Seikanron yang muncul di dalam pemerintahan Hanbatsu Jepang.

Faktor Pendorong Ekspansi Jepang:

- a. Terjadi perselisihan internal di Jepang di mana pihak yang tidak setuju dengan keputusan Iwakara menginginkan adanya ekspansi ke Korea.
- b. Kelompok tersebut juga menentang adanya pembaruan di dalam negeri Jepang.
- c. Pada tahun 1875, Jepang memberangkatkan tim survei ke Korea, namun tim ini mendapat serangan yang memicu konflik ant kedua negara.

Konflik tersebut berakhir dengan ditetapkannya Perjanjian Kanhwa. Isi dari perjanjian ini antara lain:

- a. Memberi kelonggaran bagi Jepang untuk melakukan ekspansi.
- b. Jepang mengabaikan hubungan tradisional yang ada antara Cina dan Korea, di mana Korea saat itu merupakan negara pemberi upeti terhadap Cina (Friska Ramasanti, 2017).

3. Perang Dunia II dan Pembentukan Tatanan Baru Asia Timur

Perang Dunia II menjadi bagian penting dari dinamika politik dan sejarah kawasan Asia Timur karena konflik ini



berlangsung langsung di wilayah Asia, melibatkan aktor-aktor utama kawasan, serta menghasilkan perubahan besar dalam struktur politik regional, seperti runtuhnya kekaisaran Jepang dan munculnya tatanan politik baru pascaperang. *"Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membawa perubahan besar bagi tatanan di Asia Timur, di mana pengaruh kekuatan kolonial mulai memudar dan munculnya kekuatan-kekuatan baru."* (Liu Ming dalam *Northeast Asia Order after WWII*).

Ambisi Jepang memuncak dalam doktrin "Kemakmuran Asia Timur Raya", yang menyeret seluruh kawasan ke dalam Perang Asia Pasifik, sebagai bagian dari Perang Dunia II. Jepang menginvasi Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda (Indonesia), untuk mengamankan sumber daya alam vital seperti minyak dan karet guna mendukung mesin perangnya.

Seiring berjalannya perang, posisi Jepang mulai melemah. Kemenangan Sekutu dalam pertempuran penting seperti Pertempuran Midway (1942) dan kampanye Pasifik secara bertahap memukul mundur kekuatan Jepang. Amerika Serikat menerapkan strategi "island hopping", yaitu merebut pulau-pulau strategis satu per satu untuk mendekati wilayah utama Jepang. *"Strategi militer dan keunggulan sumber daya Sekutu secara bertahap menghancurkan pertahanan Jepang di wilayah Pasifik."* (Shafiah F. Muhibat dalam *Pergeseran Kekuatan di Asia Timur*).

Puncak kehancuran Jepang terjadi pada Agustus 1945 ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Serangan ini, ditambah dengan deklarasi perang Uni Soviet terhadap Jepang, memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Penyerahan ini secara resmi mengakhiri Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik.



Perang Dunia II menghasilkan Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di Asia Timur. Perang ini juga melahirkan pembagian Korea menjadi dua negara dengan ideologi berbeda, yakni Korea Utara menganut ideologi komunis dan Korea Selatan menganut ideologi liberal - demokratis. *“Kekalahan Jepang mengakibatkan Semenanjung Korea terbagi menjadi dua zona pendudukan di sepanjang garis lintang 38 derajat, yang kemudian berkembang menjadi dua negara yang berbeda ideologi.”* (Mega Aldikawati & Ani Khairunnisa dalam *Masa Depan Reunifikasi Korea*).

4. Kekalahan Jepang Dan Pembagian Korea

Kekalahan Jepang pada tahun 1945 mengakhiri kekuasaannya, namun tidak membawa kemerdekaan langsung bagi Korea. Sebagai pemenang perang, Sekutu memutuskan untuk membagi Korea berdasarkan garis menjadi dua negara dengan ideologi berbeda, yakni Korea Utara menganut ideologi komunis dan Korea Selatan menganut ideologi liberal - demokratis. Pembagian ini memicu ketegangan berkepanjangan yang akhirnya meledak menjadi Perang Korea (1950-1953).

5. Perang Dingin Di Asia Timur Blok Komunis (Cina & Korea Utara) Vs Blok Kapitalis (Jepang, Korea Selatan)

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua negara adidaya (super power) yang memiliki kekuatan terkuat di dunia. Keduanya saling bersaing dan berusaha memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia. Dari persaingan, pergolakan, ketegangan, serta kecurigaan inilah terjadi konflik antara kedua negara adidaya tersebut yang disebut sebagai Perang Dingin. *“Perang*



Dingin (Cold-War) berlangsung sejak Amerika Serikat menggunakan doktrin Harry Truman (1948) dengan penerapan politik pembendungan (containment policy) untuk menghadapi ancaman komunisme internasional, yaitu perang ideology." (Harun Umar dalam Perkembangan Politik Internasional Era Perang Dingin dan Globalisasi).

Perang Dingin diwarnai dengan persaingan pengembangan kekuatan militer dan perlombaan senjata, termasuk pengembangan senjata nuklir. Negara-negara berkembang cenderung menggantungkan diri pada negara besar untuk mencari perlindungan keamanan, namun berisiko dijadikan alat kepentingan promosi kekuatan senjata negara adidaya (Murtamadji, 2009).

Faktor Penyebab Gagalnya Pecahnya Perang Dingin:

a. Daya Tangkal (Deterrence):

Adanya kekuatan militer yang profesional dibarengi dengan IPTEK dan persenjataan canggih mampu mengimbangi kekuatan lawan, sehingga berfungsi sebagai daya tangkal bagi lawan.

b. Sikap Hati-Hati:

Terdapat sikap hati-hati dan rasa "sama-sama takut" untuk mendahului menyerang.

c. Prinsip Damai:

Hal ini mencerminkan jargon "Sivis Pakem Para Bellum", yang berarti "jika Anda ingin damai maka bersiaplah untuk perang".

Akhir dan Implikasi Perang Dingin

d. Runtuhnya Uni Soviet:



Perang Dingin berlangsung hingga pecahnya (runtuhnya) negara Uni Soviet pada tahun 1991. Peristiwa ini menandai berakhirnya persaingan ideologis global antara Blok Barat (kapitalis) yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur (komunis) yang dipimpin Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi krisis ekonomi, politik, sosial, dan ideologis yang telah berkembang sejak dekade 1970-an hingga 1980-an. Secara formal, Uni Soviet tidak digantikan oleh satu negara baru, melainkan dibubarkan dan wilayahnya terpecah menjadi 15 negara merdeka.

Rusia menjadi penerus resmi Uni Soviet (successor state), baik secara hukum internasional maupun politik global. Uni Soviet pecah menjadi negara-negara berikut:

Rusia, Ukraina, Belarus, Moldova, Estonia, Latvia, Lituania, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizstan, dan Tajikistan.

e. Pelajaran bagi Negara Berkembang:

Kajian ini memberikan pelajaran agar negara berkembang tidak bergantung sepenuhnya pada perlindungan keamanan negara besar dan sebaliknya mengembangkan kekuatan mandiri agar memiliki daya tangkal.

6. Perang Korea (1950–1953) dan Dampaknya Terhadap Hubungan Regional

Perbedaan ideologi yang tajam antara Utara dan Selatan menjadi salah satu penyebab utama meletusnya Perang Korea (1950–1953). Perang ini membekukan konflik dan memperkuat perpecahan. Dampak jangka panjang dari Perang Korea adalah menguatnya perpecahan politik, militer, dan ideologis antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara



berkembang dengan sistem politik, ekonomi, dan orientasi kebijakan luar negeri yang sangat berbeda. Kondisi ini memperdalam rasa saling curiga dan memperkuat logika keamanan militer di kawasan, termasuk peningkatan aliansi pertahanan dan kehadiran militer asing di Asia Timur. *“Dinamika hubungan Korut dan Korsel mempengaruhi konstataasi dan konstelasi politik, termasuk stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur.” (Mega Aldikawati & Ani Khairunnisa dalam Masa Depan Reunifikasi Korea).*

Hingga saat ini, perbedaan loyalitas politik dan ideologi tersebut tetap menjadi hambatan utama bagi upaya reunifikasi Korea. Meskipun Korea Utara dan Korea Selatan berbagi kesamaan etnis, sejarah, dan budaya, warisan Perang Korea terus membentuk hubungan bilateral yang tegang. Reunifikasi tidak hanya menghadapi tantangan ideologis, tetapi juga persoalan keamanan, kepentingan aktor regional, serta perbedaan tingkat pembangunan ekonomi yang signifikan antara kedua negara.

7. Pengaruh Amerika Serikat sebagai Sekutu Jepang dan Korea Selatan

Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan memiliki latar belakang sejarah yang saling bertautan. Jepang merupakan negara yang kalah dalam Perang Dunia II melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika Serikat sangat berpengaruh dalam pecahnya Korea menjadi dua negara (Korea Utara dan Korea Selatan) dan pembentukan negara Korea Selatan. Terlepas dari latar belakang sejarah yang tidak terlalu baik, ketiga negara ini memiliki interaksi dalam kerjasama yang dapat dikatakan intens. *“Dinamika hubungan Korut dan Korsel mempengaruhi konstataasi dan konstelasi politik, termasuk stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Kedua Korea*



melakukan interaksi dan kerjasama dengan Jepang, Cina, Amerika, dan Rusia yang mempunyai keterkaitan dengan pecahnya Korea menjadi dua pada masa Perang Dingin.” (Mega Aldikawati & Ani Khairunnisa dalam Masa Depan Reunifikasi Korea).

B. Konflik dan Sengketa Kontemporer Cina-Jepang Sengketa di Wilayah Senkaku/Diaoyu

Kepulauan Senkaku terdiri dari 5 pulau vulkanik kecil dan 3 batu karang yang tidak berpenghuni dengan total luas daratan sekitar 7 km². Konflik ini memanas setelah adanya penelitian UNCAFE pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa di landas kontinen dekat Kepulauan Senkaku terdapat kandungan minyak dan gas alam yang melimpah. Kepulauan ini berada dalam status Quo dan terbukti kedua negara baru saling mengklaim setelah mengetahui adanya sumber daya alam tersebut (Adnyana et al., 2018).

Dasar Klaim Masing-Masing Negara

1. Klaim China (Diaoyutai)

- a. Sejarah: China menyatakan memiliki arsip sejarah sejak zaman Dinasti Ming (abad ke-15) yang menunjukkan bahwa kepulauan tersebut adalah bagian dari pertahanan pantai China.
- b. Kedaulatan: China menganggap Senkaku adalah satu kesatuan dengan Taiwan.
- c. Perjanjian: China berpendapat bahwa berdasarkan Proklamasi Potsdam dan Perjanjian San Francisco



1951, Jepang wajib mengembalikan wilayah yang dikuasai hasil kemenangan perang masa lalu.

- d. Geografis: China mengacu pada kelanjutan alamiah landas kontinennya yang menjangkau di luar 200 mil laut.

2. Klaim Jepang (Senkaku)

- a. Terra Nullius: Jepang menganggap kepulauan tersebut sebagai wilayah tak bertuan (terra nullius) ketika mereka memasukkannya ke dalam Prefektur Okinawa pada tahun 1895.
- b. Kontrol Efektif: Jepang meyakini telah menduduki dan memiliki kedaulatan yang sah dalam waktu yang lama.
- c. Batas Maritim: Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasarkan garis tengah (median line) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berjarak 200 mil dari garis pangkal.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa

- a. Negosiasi dan Joint Development:

China dan Jepang pernah berunding pada tahun 2006 untuk melakukan pengelolaan bersama (joint development), namun gagal karena tidak adanya kesepakatan mengenai nilai investasi dan pembagian hasil.

- b. Cara Damai (Pasal 33 Piagam PBB):



Kedua negara didorong untuk menempuh jalur damai seperti negosiasi ulang, pencarian fakta, mediasi, atau konsiliasi.

c. Mahkamah Internasional (ICJ):

Jika cara-cara diplomatik tidak menemukan titik temu, langkah terakhir yang disarankan adalah membawa sengketa ini ke International Court of Justice untuk mendapatkan putusan yang mengikat secara hukum.

Kesimpulan: Penyelesaian yang paling tepat saat ini adalah kembali merundingkan pengelolaan bersama demi kemakmuran kedua negara dan menghindari konflik militer.

C. Isu Sejarah Kejahatan Perang Jepang (Nanking, "Comfort Women")

Isu Comfort Women atau Jugun Ianfu diakui oleh Komisi HAM PBB dan Pengadilan Kejahatan Perang Internasional untuk Perempuan sebagai bentuk perbudakan seksual militer yang merusak jiwa dan raga para korban.

Selama Perang Dunia II (1939-1945), militer Jepang mengelola sekitar 290 "Comfort Stations" yang tersebar di wilayah pendudukan, termasuk Tiongkok (terkait peristiwa Nanking), Filipina, Indonesia, dan Asia Tenggara.

Tujuan sistem ini dibentuk dengan dalih mengurangi risiko penyakit menular seksual, menjaga moral tentara, dan mencegah pemerkosaan massal oleh tentara terhadap masyarakat di wilayah jajahan.

Penderitaan dan Eksploitasi Korban Kekerasan Sistematis sekitar 70-80% wanita Korea Selatan (beserta wanita dari



wilayah pendudukan lain) ditipu, diculik, dan dipaksa memberikan layanan seksual kepada tentara Jepang. Para korban dipaksa melayani hingga 40 pria per hari. Hal ini mengakibatkan infeksi pada alat kelamin, cacat fisik permanen, hingga gangguan kejiwaan serius seperti depresi dan PTSD kompleks. *“Orang tua saya curiga. Mereka mencoba menikahkan saya agar Jepang tidak bisa membawa saya untuk bekerja, tetapi saya tidak mau melakukannya. Jadi orang tua saya mencarikan saya pekerjaan sebagai juru tulis sehingga mereka bisa mengatakan bahwa saya sudah bekerja.”* (Kesaksian Pemimpin gerakan kompensasi dalam Pelajaran 5: *The Japanese Occupation of Korea*).

Setelah perang berakhir, para korban menghadapi stigma sosial dan rasa malu, sehingga banyak yang memilih diam selama beberapa dekade atau bahkan melakukan bunuh diri karena merasa kehilangan harga diri.

Budaya diam pecah pada tahun 1991 setelah Kim Hak-sun menjadi mantan korban pertama yang memberikan kesaksian publik. Korea Selatan memandang isu ini sebagai pelanggaran HAM berat yang memerlukan pertanggungjawaban moral-hukum, sementara Jepang cenderung mengambil pendekatan legalistik dan menganggap masalah ini sudah selesai melalui perjanjian tahun 1965 dan 2015. *“Dinamika hubungan ini mencerminkan bagaimana luka sejarah masa lalu tetap menjadi hambatan dalam normalisasi hubungan diplomatik dan kerja sama keamanan di Asia Timur.”* (M. Najeri Al Syahrin dalam *Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerja Sama Keamanan Asia Timur*).

Era Moon Jae-in (2017-2022): Pendekatan Berbasis Korban (Victim-Centered), meninjau kembali perjanjian 2015 yang



dianggap tidak memadai dan membubarkan Reconciliation and Healing Foundation bentukan Jepang.

Memorialisasinya menetapkan 14 Agustus sebagai Hari Peringatan Nasional bagi korban Comfort Women dan membangun museum serta monumen untuk mengedukasi publik dan dunia internasional.

Di tingkat Internasional, membawa isu ini ke forum global seperti Dewan HAM PBB untuk menegaskan bahwa ini adalah masalah kejahatan perang berbasis gender yang tidak boleh terulang (Jenny, 2025).

D. Peran PBB dalam Konflik Cina-Jepang dan Isu Kejahatan Perang Jepang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional pasca-Perang Dunia II. Di Asia Timur, dinamika konflik antara Cina dan Jepang serta isu sejarah kejahatan perang Jepang menjadi arena utama keterlibatan PBB, baik melalui mekanisme diplomasi, hukum internasional, maupun rezim hak asasi manusia (HAM). Dua isu sentral yang sering dibahas adalah sengketa wilayah Senkaku/Diaoyu antara Cina dan Jepang serta isu kejahatan perang Jepang seperti Pembantaian Nanking dan praktik “comfort women”.

1. Peran PBB dalam Konflik Cina-Jepang: Sengketa Wilayah Senkaku/Diaoyu

Kepulauan Senkaku (nama Jepang) atau Diaoyu (nama Cina) adalah gugusan pulau kecil di Laut Cina Timur yang diperebutkan oleh Jepang, dan Republik Rakyat Cina (RRC). Jepang menguasai wilayah ini sejak 1895, sementara Cina



menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut secara historis merupakan bagian dari wilayahnya sejak Dinasti Ming. Sengketa ini semakin mengeras sejak ditemukannya potensi sumber daya alam (minyak dan gas) di sekitar wilayah tersebut pada akhir abad ke-20. *“Sengketa-sengketa wilayah yang terjadi di kawasan Asia mengharuskan Jepang untuk terus melakukan transformasi pertahanan militernya.”* (Rezky Ramadhan Antuli dkk. dalam Analisis Perspektif Security Dilemma di Kawasan Asia Timur).

Walaupun sengketa ini belum pernah secara langsung menjadi misi militer PBB seperti Perang Korea, PBB berperan dalam kerangka:

a. Hukum Internasional dan Resolusi Damai

PBB melalui Piagam PBB mendorong penyelesaian sengketa secara damai (Pasal 2 ayat 3 dan Bab VI). Jepang dan Cina didorong untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi, arbitrase, atau Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), meskipun hingga kini kedua pihak belum sepakat membawa perkara ini ke ICJ.

b. Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS)

Sengketa Senkaku/Diaoyu terkait erat dengan delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). PBB melalui UNCLOS menjadi kerangka hukum utama yang digunakan Jepang dan Cina dalam mengajukan klaim maritim, khususnya terkait landas kontinen dan hak eksplorasi sumber daya.

c. Forum Multilateral PBB

Majelis Umum PBB dan berbagai forum internasional menjadi arena diplomasi bagi Jepang dan Cina untuk menyuarkan posisi masing-masing, meskipun PBB cenderung mendorong



de-eskalasi dan stabilitas kawasan daripada memihak salah satu pihak.

2. Peran PBB dan Isu Sejarah Kejahatan Perang Jepang

a. Peran PBB Dalam Pembantaian Nanking (1937–1938)

Setelah PBB berdiri pada 1945, isu kejahatan perang Jepang ditempatkan dalam kerangka hukum internasional melalui:

- Prinsip-prinsip Piagam PBB tentang penghormatan HAM.
- Pengembangan hukum pidana internasional yang menegaskan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh dilupakan atau diabaikan.
- Walaupun Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (IMTFE/Tokyo Trial) berlangsung sebelum PBB sepenuhnya mapan, nilai-nilai yang kemudian diusung PBB memperkuat legitimasi internasional dalam menuntut pertanggungjawaban Jepang atas kejahatan perang.

b. Isu “Comfort Women”

“Comfort women” merujuk pada perempuan, terutama dari Korea, Cina, dan Asia Tenggara, yang dipaksa menjadi budak seksual oleh militer Jepang selama Perang Dunia II.

Peran PBB melalui mekanisme HAM, khususnya: Komisi HAM PBB dan kemudian Dewan HAM PBB, Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, menyatakan bahwa praktik “comfort women” merupakan bentuk perbudakan seksual dan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB secara



konsisten mendesak Jepang untuk memberikan pengakuan penuh, permintaan maaf resmi, serta kompensasi yang adil kepada para korban.

3. Diplomasi Sejarah dan Rekonsiliasi

Isu kejahatan perang Jepang menjadi sumber ketegangan diplomatik antara Jepang dengan Cina dan Korea. PBB berperan sebagai:

- a. Forum moral dan normatif, yang menegaskan pentingnya keadilan transisional (transitional justice).
- b. Penjaga norma HAM global, yang mendorong rekonsiliasi berbasis kebenaran, pengakuan, dan pemulihan korban.

E. Ketegangan Keamanan Regional dan Perlombaan Senjata Serta Dampaknya

Dalam literatur hubungan internasional, arms race atau perlombaan senjata dipahami sebagai “manifestasi ekstrem dari serangkaian tekanan mendasar yang mendorong negara-negara untuk mempersenjatai dan meningkatkan kemampuan militer mereka” yang memicu security dilemma, yaitu ketika upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya malah membuat negara lain merasa terancam dan menanggapi secara seimbang/lebih agresif. *“Berdasarkan konsep security dilemma tindakan yang dilakukan oleh satu negara menjadi sebuah ancaman bagi negara yang lainnya. Meskipun upaya yang dilakukan hanya sebatas upaya pertahanan namun akan dinilai sebagai tindakan ofensif yang akan mengancam keamanan*



nasionalnya.” (Rezky Ramadhan Antuli dkk. dalam Analisis Perspektif Security Dilemma di Kawasan Asia Timur).

Ketegangan keamanan regional merujuk pada kondisi di mana hubungan antara negara-negara di suatu kawasan berupa kekhawatiran strategis yang tinggi, ketidakpercayaan, dan kompetisi kekuatan, yang berpotensi meningkatkan risiko konflik terbuka.

F. Penyebab Utama Ketegangan Keamanan dan Arms Race

1. Security Dilemma

Dalam banyak kajian, arms race dipicu oleh security dilemma, situasi di mana “ketika suatu negara meningkatkan keamanan militernya, negara tersebut mungkin menurunkan keamanan negara lain sehingga mengundang aksi-reaksi negara lain.”

2. Perubahan Lingkungan Strategis

Perubahan hubungan kekuatan global, seperti meningkatnya pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik atau pembentukan aliansi baru seperti AUKUS, telah memperburuk ketegangan di kawasan, sehingga meningkatkan kemungkinan perlombaan senjata.

3. Pewarisan Konflik

Dalam kasus Asia Selatan, perlombaan senjata nuklir India-Pakistan menggambarkan kompetisi struktural yang telah berlangsung lama, di mana tindakan peningkatan sistem senjata oleh satu pihak langsung memicu peningkatan oleh pihak lain sebagai respons strategis.



G. Dampak Ketegangan Keamanan dan Arms Race

Dampak arms race tidak hanya soal militer, tetapi juga mempengaruhi stabilitas regional, ekonomi, dan kebijakan luar negeri.

1. Risiko Stabilitas Regional

Dalam konteks Asia Selatan, perlombaan senjata nuklir antara India dan Pakistan “menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional” karena eskalasi kemampuan persenjataan meningkatkan risiko salah perhitungan dan konflik berskala besar.

2. Dilema Keamanan di Kawasan

Dalam kajian Asia Tenggara, setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara cenderung meningkatkan anggaran militer mereka secara agresif karena kekosongan jaminan keamanan, yang menciptakan security dilemma dan potensi arms race baru di kawasan tersebut.

3. Ketegangan Diplomatik dan Politik Luar Negeri

Perubahan struktur keamanan dan perlombaan senjata dapat memperumit hubungan diplomatik antarnegara. Misalnya, keputusan aliansi seperti AUKUS meningkatkan ketegangan dengan negara lain yang melihat modernisasi militer sebagai ancaman.

4. Dampak Ekonomi

Perlombaan senjata dan peningkatan pengeluaran militer sering memaksa negara untuk mengalokasikan sumber daya yang sangat besar, yang dapat “menekan pertumbuhan ekonomi jangka panjang” karena berkurangnya alokasi untuk sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur.



5. Menghambat Kerja Sama Keamanan Regional

Kompleksitas persaingan kekuatan (mis. China-AS di Asia Timur) membuat kerja sama keamanan menjadi sulit, karena prioritas negara sering didasarkan pada kemampuan militer dan kekuatan aliansi daripada mekanisme multilateral yang damai.

H. Rangkuman

Konflik sedaratan di Asia Timur antara China, Korea, dan Jepang merupakan isu yang berakar kuat pada dinamika sejarah, nasionalisme, dan persaingan kekuatan politik regional. Pengalaman kolonialisme, perang besar seperti Perang Tiongkok- Jepang dan Perang Korea, serta memori kolektif mengenai kekejaman masa lalu membentuk hubungan yang penuh kecurigaan dan rivalitas hingga masa kini. Dalam perkembangan kontemporer, ketegangan semakin diperkuat oleh sengketa wilayah, ekspansi militer, rivalitas geopolitik, serta isu sejarah seperti kejahatan perang Jepang. Keterlibatan Amerika Serikat sebagai sekutu Jepang dan Korea Selatan juga memberikan dimensi baru yang memperumit stabilitas kawasan. Perdebatan internasional melalui PBB dan forum global lainnya menunjukkan bahwa upaya diplomasi tetap menjadi mekanisme penting untuk mengendalikan eskalasi konflik. Namun, perlombaan senjata dan strategi militer negara-negara besar, khususnya China, memunculkan dilema keamanan yang dapat menghambat kerja sama regional. Secara keseluruhan, konflik di Asia Timur bukan hanya persoalan politik dan militer, tetapi juga mencakup dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya penyelesaian membutuhkan dialog yang konsisten, transparansi, serta



komitmen bersama untuk membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas jangka panjang di kawasan Asia Timur.



DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Yuni Wachid. (t.t.). *INVASI JEPANG DI SEMENANJUNG KOREA DAN HINDIA BELANDA: RESISTENSI BANGSA KOREA DAN INDONESIA KEPADA JEPANG*. Humanis.
- Hartono, Mudji. (t.t.). *NASIONALISME ASIA TIMUR: SUATU PERBANDINGAN JEPANG, CINA, DAN KOREA*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wibowo, Eko Yulianto. (2024). *DINAMIKA STRATEGI PERTAHANAN JEPANG DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DI KAWASAN ASIA TIMUR PADA TAHUN 2020-2023*. *DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL*.
- Adnyana, K. T. S., Mangku, D. G. S., & Windari, R. A. (2018). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku Antara China dan Jepang dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 99–110. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28669%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/28669/16178>
- Friska Ramasanti. (2017). *Strategi Pemerintah Tiongkok Menghadapi Kebangkitan Militer Jepang (2007-2016)*. 15–33.
- Jenny, L. (2025). *Analisis Kebijakan Comfort Women di Korea Selatan Pada Masa Kepemimpinan Moon Jae-in*. 6, 167–186.
- Murtamadji, M. (2009). Kegagalan Perang Dingin Antara dua Negara Adidaya: Faktor Penyebab Dan Implikasinya. *Humanika*, 9(1), 81–92. <https://doi.org/10.21831/hum.v9i1.3785>



DINAMIKA DAN TRANSFORMASI POLITIK ASIA TIMUR

IDEOLOGI, RESTORASI, DAN KONFLIK REGIONAL
(1535-1954)

Buku *Dinamika dan Transformasi Politik Asia Timur Ideologi Restorasi dan Konflik Regional 1535-1954* mengajak pembaca menelusuri perjalanan panjang perubahan politik di Asia Timur sejak abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Kawasan ini tidak hanya menjadi ruang tumbuhnya kekuatan-kekuatan besar, tetapi juga medan pertarungan ideologi, ambisi kekuasaan, dan upaya pembaruan yang membentuk wajah Asia Timur modern.

Dimulai dari proses penyatuan Jepang melalui peran tiga tokoh besar Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu, buku ini menunjukkan bagaimana stabilitas politik dibangun di atas konflik dan strategi kekuasaan. Pembahasan berlanjut pada Restorasi Meiji yang menjadi titik balik Jepang dari negara feodal menuju kekuatan modern, sekaligus mengubah peta politik kawasan.

Di sisi lain, dinamika politik China dikaji melalui gagasan kenegaraan Sun Yat Sen dan kebijakan radikal Mao Zedong yang dikenal sebagai Lompatan Jauh ke Depan. Perubahan-perubahan ini tidak hanya berdampak pada China, tetapi juga memengaruhi hubungan regional dengan Korea dan Jepang. Ketegangan, perang, dan diplomasi internasional yang melibatkan ketiga negara tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk konflik kawasan Asia Timur antara tahun 1894 hingga 1954.

Dengan pendekatan naratif dan analisis yang mudah dipahami, buku ini menyajikan sejarah politik Asia Timur sebagai sebuah kisah perubahan besar yang saling terkait. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, mahasiswa, guru, serta masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana ideologi, restorasi, dan konflik regional membentuk Asia Timur seperti yang dikenal saat ini.



Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
Pondok Karisma Residence
Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

